



Bea
Cukai
KANWILJAKARTA

KANWIL DJBC JAKARTA

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025

TINGKAT UAKPA

Laporan Keuangan TA 2025

Audited

(668906)

Jl. Merpati Blok B-12 Kav. 4 Kota Baru,
Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat - 10610

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah DJBC Jakarta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Kantor Wilayah DJBC Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan tingkat UAKPA Audited Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan keuangan dan barang tingkat satuan kerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta yang diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah DJBC Jakarta. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 7 Mei 2026
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Hendri Darnadi



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA**

Jl. Merpati Blok B-12, kav 4 Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat (10610)
Telepon: (021) 65867920; Faksimile: (021) 65867864; www.beacukai.go.id
Pusat Kontak Layanan 1500225; Surat Elektronik: kwbcjakarta@customs.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan TA 2025 *Audited* Tingkat UAKPA Kantor Wilayah DJBC Jakarta yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 7 Mei 2026
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Hendri Darnadi

DAFTAR ISI

	Hal
Pernyataan Tanggung Jawab	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	33
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	41
F. Pengungkapan Penting Lainnya	43
VI. Lampiran	58

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan TA 2025 Audited Kantor Wilayah DJBC Jakarta ini disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 Audited adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp5.980.000**.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 Audited adalah sebesar **Rp5.652.623.101** atau mencapai **72,70%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp7.774.814.000**.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar **Rp85.456.917.555** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp84.280.569**; Aset Tetap (neto) sebesar **Rp85.372.636.986**; Piutang Jangka Panjang sebesar **Rp0** dan Aset Lainnya sebesar **Rp0**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp2.897.800** dan **Rp85.454.019.755** jadi jumlah Kewajiban dan Ekuitas adalah sebesar **Rp85.456.917.555**.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang

diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp7.228.353.885 sehingga terdapat Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp(7.228.353.885). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus/(defisit) sebesar Rp5.980.000 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(7.222.373.885).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal adalah sebesar Rp85.824.069.136 ditambah Surplus-LO sebesar Rp(7.222.373.885) kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp6.852.324.504 dan penurunan Ekuitas sebesar Rp(370.049.381) sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp85.454.019.755.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk TA 2025 Audited disusun dan disajikan dengan Basis AkruaI.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
	ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN				
Penerimaan Perpajakan	-	-	n/a	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	5,980,000	0.00	184,882,886
Penerimaan Hibah	-	-	n/a	-
JUMLAH PENDAPATAN	-	5,980,000	0.00	184,882,886
BELANJA				
Belanja Pegawai	-	-	n/a	-
Belanja Barang	7,468,625,000	5,652,623,101	75.68	7,368,169,740
Belanja Modal	306,189,000	-	0.00	277,900,000
JUMLAH BELANJA	7,774,814,000	5,652,623,101	72.70	7,646,069,740

II. NERACA

KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(DalamRupiah)

URAIAN	TA 2025	TA 2024
ASET		
ASET LANCAR		
kas di Bendahara pengeluaran	-	-
kas Lainnya dan Setara Kas	-	-
Piutang Bukan Pajak	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	-	-
Piutang Bukan Pajak (Neto)	-	-
Persediaan	84,280,569	190,784,664
Jumlah Aset Lancar	84,280,569	190,784,664
ASET TETAP		
Tanah	56,628,375,000	56,628,375,000
Peralatan dan Mesin	17,934,462,897	18,701,646,447
Gedung dan Bangunan	34,110,464,115	34,110,464,115
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(23,300,665,026)	(23,713,986,517)
Jumlah Aset Tetap	85,372,636,986	85,726,499,045
PIUTANG JANGKA PANJANG		
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-	-
JUMLAH ASET	-	-
ASET LAINNYA		
Aset Lain-Lain	1,539,199,063	468,062,663
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	(1,539,199,063)	(468,062,663)
Jumlah Aset Lainnya	-	-
JUMLAH ASET	85,456,917,555	85,917,283,709
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang kepada Pihak Ketiga	2,897,800	93,214,573
Utang Yang Belum Ditagihkan	-	-
Uang Muka dari KPPN	-	-
Uang Jangka Pendek Lainnya	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	2,897,800	93,214,573
EKUITAS		
Ekuitas	85,454,019,755	85,824,069,136
JUMLAH EKUITAS	85,454,019,755	85,824,069,136
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	85,456,917,555	85,917,283,709

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2025	TA 2024
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN		
Pendapatan Perpajakan	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	-	15,000,000
Pendapatan Hibah	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	-	15,000,000
BEBAN		
Beban Pegawai	-	-
Beban Persediaan	259,965,194	846,632,288
Beban Barang dan Jasa	3,306,667,207	4,379,386,122
Beban Pemeliharaan	1,455,916,492	1,756,371,050
Beban Perjalanan Dinas	824,403,683	1,083,324,008
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,381,401,309	1,249,812,220
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-
JUMLAH BEBAN	7,228,353,885	9,315,525,688
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(7,228,353,885)	(9,300,525,688)
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non lancar	2,380,000	166,282,886
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,600,000	3,600,000
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5,980,000	169,882,886
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(7,222,373,885)	(9,130,642,802)
POS LUAR BIASA	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	(7,222,373,885)	(9,130,642,802)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2025	TA 2024
EKUITAS AWAL	85,824,069,136	86,078,765,887
SURPLUS/DEFISIT LO	(7,222,373,885)	(9,130,642,802)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	-	-
LAIN-LAIN	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	6,852,324,504	8,875,946,051
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(370,049,381)	(254,696,751)
EKUITAS AKHIR	85,454,019,755	85,824,069,136

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-181/BC/2022 Tentang Peralihan Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta. Pada saat ini Kantor Wilayah DJBC Jakarta membawahi KPPBC TMP A Jakarta, KPPBC TMP A Marunda, KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru, BLBC Kelas I Jakarta, PSO Bea dan Cukai Tipe B Tanjung Priok, KPPBC TMP A Bekasi, dan KPPBC TMP Cikarang.

Kanwil DJBC Jakarta memiliki tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Wilayah DJBC Jakarta mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Kantor Wilayah DJBC Jakarta memiliki sebuah pandangan yang mengedepankan perubahan untuk menjadi lebih baik, meningkatkan inovasi dan kreativitas serta mewujudkan Sumber Daya Manusia yang ahli, terampil, berdedikasi serta memiliki integritas tinggi. Untuk memenuhi pandangan tersebut di atas Kantor Wilayah DJBC Jakarta mengkrystalisasikan dalam sebuah visi yaitu:

“Menjadi Kantor Wilayah Andalan dan Panutan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”

Visi tersebut memberikan suatu gambaran bahwa di dalam mengemban suatu pelaksanaan tugas ke depan semakin meningkat dan semakin baik di

bidang kepabeanan dan cukai dan pada akhirnya tujuan organisasi tercapai.

Keberadaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan suatu kepanjangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Untuk mewujudkan visi menjadi kantor wilayah terbaik dalam jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka Kanwil DJBC Jakarta menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terkait maupun tidak terkait dengan kepabeanan dan cukai.
2. Komitmen dan tekad yang tinggi untuk menjadikan Kantor Wilayah DJBC Jakarta menjadi kantor wilayah terbaik dalam jajaran DJBC.
3. Adanya koordinasi yang baik antara Kantor Wilayah DJBC Jakarta dengan kantor pelayanan di lingkungan Kanwil DJBC Jakarta.
4. Mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkenaan dengan bidang kepabeanan dan cukai.
5. Mengoptimalkan penerimaan negara di bidang penerimaan perpajakan, khususnya bea masuk, bea keluar dan cukai.
6. Menjadikan kantor modern dengan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan TA 2025 Audited ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah DJBC Jakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Mulai Tahun Anggaran 2021, SAI telah menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dengan konsep single database.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah DJBC Jakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi,

tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Dasar
Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah DJBC Jakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Peraturan

A.5. Peraturan

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2012;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023;
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
 17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
 18. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2025 Audited telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah DJBC Jakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJBC Jakarta adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas

dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta

rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya

adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 81/KM.6/2018 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

(6) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih

- Penatausahaan Piutang sesuai dengan Perdirjen DJBC nomor PER-23/BC/2018 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada

tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(7) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan
Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Aset Tetap Renovasi berupa Tanah.
 - b. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat.
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode

garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Persediaan
BTD, BDN,
BMMN

(8) Persediaan BTD, BDN, BMMN

Selain Persediaan yang diperoleh melalui pembelian, terdapat Persediaan BTD/BDN/BMMN yang berasal dari sitaan/rampasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanaan dan Cukai. Persediaan yang berasal dari BTD, BDN dan BMMN diakui sebagai Persediaan BTD/BDN/BMMN pada saat:

1. Terbit surat persetujuan lelang atas BMMN dari pengelola barang. Persediaan BTD/BDN/BMMN ini dibukukan sampai dengan terbitnya dokumen pengeluaran barang;
2. Terbit Naskah dinas persetujuan hibah dari Menteri Keuangan/Pengelola Barang. Persediaan BTD/BDN/BMMN ini dibukukan sampai dengan terbitnya Berita Acara Serah Terima (BAST); atau
3. Terbit naskah dinas Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan (PSP). Persediaan ini dibukukan sampai dengan dihapuskan.

BTD atau BDN selain peruntukan hibah atau PSP tidak disajikan dalam Laporan Keuangan karena belum adanya perpindahan kepemilikan barang dari pemilik barang ke pemerintah. BMMN selain peruntukan lelang, hibah, atau PSP tidak dapat disajikan dalam Neraca karena tidak memiliki manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan.

Nilai Persediaan yang berasal dari BTD, BDN, dan BMN berupa:

1. Persediaan BTD/BDN/BMMN dengan peruntukan lelang atas BMMN disajikan sebesar nilai wajar yang tercantum pada surat persetujuan lelang dari Pengelola Barang;
2. Persediaan BTD/BDN/BMMN dengan peruntukan hibah disajikan sebesar nilai yang tercantum pada naskah dinas persetujuan Hibah dari Menteri Keuangan;
3. Persediaan yang berasal dari BTD/BDN/BMMN dengan peruntukan PSP disajikan sebesar nilai yang tercantum pada naskah dinas Menteri Keuangan tentang PSP dari Pengelola Barang atau Naskah Dinas Persetujuan PSP dari Menteri Keuangan.

Dalam mencatat Persediaan BTD/BDN/BMMN menggunakan metode pencatatan Perpetual dan dikecualikan dari metode penilaian FIFO.

(9) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(10) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

B.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp5.980.000 yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	TA 2025	
	Estimasi Pendapatan	Realisasi
Penerimaan Perpajakan	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	5,980,000
Penerimaan Hibah	-	-
Jumlah	-	5,980,000

Rincian Estimasi dan Realisasi Penerimaan Bukan Pajak

Uraian	TA 2025	
	Estimasi Pendapatan	Realisasi
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	2,380,000
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	3,600,000
Jumlah	-	5,980,000

Realisasi
Pendapatan
Rp5.980.000

Realisasi Belanja
Negara
Rp5.652.623.101

B. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.652.623.101 atau 72,70% dari anggaran belanja sebesar Rp7.774.814.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
Belanja Pegawai	-	-	n/a
Belanja Barang	7,468,625,000	5,652,623,101	75.68%
Belanja Modal	306,189,000	-	0.00%
Total Belanja Kotor	7,774,814,000	5,652,623,101	72.70%
Pengembalian	-	-	n/a
Jumlah	7,774,814,000	5,652,623,101	72.70%



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 26,07%. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Terdapat blokir atas pagu belanja modal pada tahun 2025 sehingga tidak terdapat realisasi pada belanja modal;
2. Terdapat efisiensi atas penyerapan anggaran pada tahun 2025 berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga terdapat beberapa kegiatan yang dilarang seperti kegiatan seremonial, studi banding, pencetakan, dan seminar, serta adanya pemotongan biaya perjalanan dinas sebesar 50% dari Standar Biaya Masukan (SBM).

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	5,652,623,101	7,368,169,740	(23.28)
Belanja Modal	-	277,900,000	(100.00)
Jumlah	5,652,623,101	7,646,069,740	(26.07)

Belanja Pegawai
Rp 0

B.4 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hal ini disebabkan karena sentralisasi belanja pegawai berupa Gaji Pokok, Tunjangan, Uang Makan, dan Uang Lembur di lingkungan sakter Kanwil DJBC Jakarta ke Eselon I/ Kantor Pusat DJBC.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik/(Turun)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS			
Belanja Gaji Pokok PNS	-	-	0.00%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	-	0.00%
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	0.00%
Belanja Tunj. Anak PNS	-	-	0.00%
Belanja Tunj. Struktural PNS	-	-	0.00%
Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	-	0.00%
Belanja Tunj. PPh PNS	-	-	0.00%
Belanja Tunj. Beras PNS	-	-	0.00%
Belanja Uang Makan PNS	-	-	0.00%
Belanja Tunjangan Umum PNS	-	-	0.00%
Belanja Uang Lembur	-	-	0.00%
Realisasi Belanja Bruto	-	-	0.00%
Pengembalian Belanja	-	-	0.00%
Realisasi Belanja Netto	-	-	0.00%

Belanja Barang
Rp5.652.623.101

B.5 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.652.623.101 dan Rp7.368.169.740. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan 23,28% dari Realisasi Belanja Barang TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Terdapat efisiensi atas penyerapan anggaran pada tahun 2025 berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga terdapat beberapa kegiatan yang dilarang seperti kegiatan seremonial, studi banding, pencetakan, dan seminar, serta adanya pemotongan biaya perjalanan dinas sebesar 50% dari Standar Biaya Masukan (SBM);
2. Pengalihan tagihan Belanja Langganan Lisitrik dan Telepon ke DIPA Kantor Pusat DJBC;
3. Menurunnya kegiatan Perjalanan Dinas di periode pelaporan.

Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik/(Turun)	%
Belanja Keperluan Perkantoran	Rp 2,333,996,055	Rp 2,443,189,380	Rp (109,193,325)	-4.47
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp 8,133,000	Rp 27,550,200	Rp (19,417,200)	-70.48
Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	Rp 6,617,500	Rp 8,098,099	Rp (1,480,599)	-18.28
Honor Terkait Operasional Satuan Kerja	Rp 70,531,001	Rp 53,352,000	Rp 17,179,001	32.20
Belanja Barang Operasional Lainnya	Rp 58,000,000	Rp 92,870,000	Rp (34,870,000)	-37.55
Belanja Bahan	Rp 77,709,100	Rp 102,649,570	Rp (24,940,470)	-24.30
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Rp 369,688,201	Rp 216,497,261	Rp 153,190,940	70.76
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp 71,828,271	Rp 131,146,660	Rp (59,318,389)	-45.23
Belanja Barang Persediaan Lainnya	Rp 13,886,200	Rp 15,832,485	Rp (1,946,285)	-12.29
Belanja Langganan Listrik	Rp -	Rp 1,134,928,301	Rp (1,134,928,301)	-100.00
Belanja Langganan Telepon	Rp -	Rp 1,548,098	Rp (1,548,098)	-100.00
Belanja Langganan Air	Rp 44,313,850	Rp 29,701,410	Rp 14,612,440	49.20
Belanja Sewa	Rp 197,280,700	Rp 209,464,250	Rp (12,183,550)	-5.82
Belanja Jasa Profesi	Rp 137,500,000	Rp 26,550,000	Rp 110,950,000	417.89
Belanja Jasa Lainnya	Rp -	Rp 29,921,160	Rp (29,921,160)	-100.00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 910,725,410	Rp 892,182,064	Rp 18,543,346	2.08
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 18,081,900	Rp 27,653,930	Rp (9,572,030)	-34.61
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 509,928,230	Rp 841,710,864	Rp (331,782,634)	-39.42
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp -	Rp -	N/A
Belanja Pemeliharaan Jaringan	Rp -	Rp -	Rp -	N/A
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 629,105,683	Rp 607,824,008	Rp 21,281,675	3.50
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 195,348,000	Rp 475,500,000	Rp (280,152,000)	-58.92
Jumlah Belanja Bruto	Rp 5,652,673,101	Rp 7,368,169,740	Rp (1,715,496,639)	-23.28
Pengembalian Belanja	Rp 50,000	Rp -	Rp -	N/A
Jumlah Belanja Neto	Rp 5,652,623,101	Rp 7,368,169,740	Rp (1,715,496,639)	-23.28

Belanja Modal
Rp0

B.6 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp277.900.000. Pada tahun 2025 tidak terdapat realisasi Belanja Modal karena adanya blokir pada pagu anggaran Belanja Modal sehingga mengalami penurunan 100% dari realisasi Belanja Modal TA 2024. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Belanja Modal TA 2025 dan 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik / (Turun)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	277,900,000	(1.00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	n/a
Jumlah Belanja Kotor	-	277,900,000	(1.00)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	277,900,000	-100.00%

B.6.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 adalah sebesar Rp0, sedangkan realisasi TA 2024 sebesar Rp277.900.000. Belanja Modal tidak dapat dilakukan karena adanya blokir.

B.6.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada periode berjalan tidak mengalami kenaikan karena tidak adanya renovasi maupun pembangunan lain.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2024	TA 2023
Uang Persediaan untuk keperluan Belanja Modal	-	-
Pembayaran honor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jasa Konstruksi Renovasi Gedung Kanwil DJBC Jakarta	-	-
Pembayaran Kesatu Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Renovasi Gedung	-	-
Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Renovasi Gedung Kanwil DJBC Jakarta	-	-
Pembayaran Renovasi Gedung Kantor Wilayah DJBC Jakarta	-	-
Pengembalian UP Belanja Modal	-	-
Jumlah Belanja	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas
Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan Kas yang berada di bawah tanggungjawab bendahara pengeluaran yang digunakan untuk keperluan perkantoran dan lain-lain. Rincian sumber Kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember TA 2024

No.	Uraian	TA 2025	TA 2024
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp -	Rp -
	Jumlah	Rp -	Rp -

Kas Lainnya dan setara
Kas
Rp0

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan Kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember TA 2024

No.	Uraian	TA 2025	TA 2024
1	Kas Lainnya dan Setara Kas	Rp -	Rp -
	Jumlah	Rp -	Rp -

Piutang
Rp0

C.3 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Persediaan
Rp84.280.569

C.4 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penjelasan dalam pos persediaan meliputi penjelasan atas kenaikan/penurunan antara saldo persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 serta detail transaksi mutasi persediaan selama Tahun 2024.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp84.280.569 dan Rp190.784.664, mengalami

penurunan sebesar Rp(106,504,095) atau sebesar 55,82%. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember TA 2024

No.	Uraian	TA 2025	TA 2024	Kenaikan /Penurunan	% Naik/Turun
1	Barang Konsumsi	Rp 58,860,479	Rp 142,863,422	Rp (84,002,943)	-58.80
2	Amunisi	Rp 8,450,255	Rp 13,770,455	Rp (5,320,200)	-38.63
3	Barang Untuk Pemeliharaan	Rp 16,969,835	Rp 34,150,787	Rp (17,180,952)	-50.31
4	Suku Cadang	Rp -	Rp -	Rp -	-
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	Rp -	Rp -	Rp -	-
6	Bahan Baku	Rp -	Rp -	Rp -	-
7	Persediaan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah	Rp 84,280,569	Rp 190,784,664	Rp (106,504,095)	-55.82

Rincian Mutasi Persediaan per 31 Desember 2025

Saldo Awal Persediaan 01 Januari 2025	Rp 190,784,664
Mutasi Tambah	
Pembelian	Rp 103,796,371
Transfer Masuk	Rp 84,927,580
Reklasifikasi Masuk	
Saldo Awal	
Jumlah Mutasi Tambah	Rp 188,723,951
Mutasi Kurang	
Habis Pakai	Rp (295,228,046)
Transfer Keluar	Rp -
Reklasifikasi Keluar	Rp -
Jumlah Mutasi Kurang	Rp (295,228,046)
Nilai Buku Per 30 September 2024	Rp 84,280,569

Mutasi persediaan selama periode Tahun 2025 terdiri dari mutasi tambah sebesar Rp188.723.951 dan mutasi kurang sebesar Rp(295.228.046). Adapun rincian mutasi persediaan Kantor Wilayah DJBC Jakarta yang terjadi selama periode Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Pembelian adalah transaksi penambahan persediaan yang berasal dari pembelian menggunakan dana DIPA tahun anggaran berjalan. Mutasi persediaan yang berasal dari Pembelian pada Kantor Wilayah DJBC Jakarta sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp103.796.371.

Rincian Belanja Persediaan per 31 Desember 2025

Kode Akun	Nama Akun	Nilai
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp 71,828,271
521812	Belanja Barang Persediaan Amunisi	Rp -
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	Rp -
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	Rp 13,886,200
521841	Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19	Rp -
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 18,081,900
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp -
521821	Belanja Barang Persediaan Bahan Baku	Rp -
	Jumlah	Rp 103,796,371

2. Transfer Masuk merupakan transaksi transfer masuk dan keluar persediaan antar satker yang menggunakan aplikasi SAKTI. Transaksi ini tidak ada pada aplikasi Persediaan offline. Mekanisme ini diterapkan untuk meminimalisir kesalahan pencatatan transfer masuk dan transfer keluar persediaan. Satker yang melakukan transfer keluar melakukan penginputan barang yang ditransfer dikeluarkan dan menentukan satker yang menerima transfer keluar tersebut. Kemudian satker penerima transfer melakukan pendetailan atas transfer tersebut. Transfer masuk persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp84.927.580 dengan rincian sebagaimana berikut.

Rincian Transfer Masuk Persediaan per 31 Desember 2025

Kode Akun	Nama Akun	Nilai
117111	Barang Konsumsi	Rp 75,510,480
117112	Amunisi	Rp 9,417,100
	Jumlah	Rp 84,927,580

3. Habis Pakai merupakan transaksi yang mencatat pengeluaran persediaan karena adanya pemakaian, kecuali atas transaksi terkait dengan pita cukai. Untuk pita cukai transaksi pemakaian digunakan saat pita cukai telah diserahkan kepada perusahaan/importir BKC. Habis pakai persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp(295.228.046) dengan rincian sebagaimana berikut.

Rincian Habis Pakai Persediaan per 31 Desember 2025

Kode Akun	Nama Akun	Nilai
117111	Barang Konsumsi	Rp (231,341,694)
117112	Amunisi	Rp (14,737,300)
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	Rp (35,262,852)
117131	Bahan Baku	Rp -
117199	Persediaan Lainnya	Rp (13,886,200)
	Jumlah	Rp (295,228,046)

4. Reklasifikasi Masuk merupakan transaksi tambah/masuk atas koreksi pencatatan karena kesalahan pencatatan kode barang antar akun persediaan. Reklasifikasi masuk berkaitan erat dengan transaksi Reklasifikasi Keluar, reklas masuk dicatat pada Modul Persediaan setelah reklas keluar dicatat terlebih dahulu pada Modul Persediaan. Oleh karena itu, nilai total transaksi reklas masuk harus sama dengan reklas keluar. Reklasifikasi masuk persediaan adalah sebesar Rp0 dengan rincian sebagaimana berikut.

Rincian Reklasifikasi Masuk Persediaan per 31 Desember 2025

Kode Akun	Nama Akun	Nilai
117111	Barang Konsumsi	Rp -
Jumlah		Rp -

5. Reklasifikasi Keluar merupakan transaksi yang digunakan untuk melakukan koreksi pencatatan kurang persediaan terkait dengan kesalahan pencatatan kode barang. Reklas keluar berkaitan erat dengan reklas masuk. Reklas keluar ini merupakan lawan dari transaksi reklas masuk, sehingga nilainya harus sama antara reklas keluar dan masuk. Reklasifikasi keluar persediaan adalah sebesar Rp(0), dengan rincian sebagaimana berikut.

Rincian Reklasifikasi Keluar Persediaan per 31 Desember 2025

Kode Akun	Nama Akun	Nilai
117111	Barang Konsumsi	Rp -
Jumlah		Rp -

Tanah

Rp56.628.375.000

C.5 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah DJBC Jakarta per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp56.628.375.000 dan Rp56.628.375.000. Selama periode TA 2025 tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang Tanah pada Kanwil DJBC Jakarta yang dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	56,628,375,000
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2025	56,628,375,000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	1973 m2	Jl. Kemayoran Blok B12 Kav.4, Kota Baru, Bandar Kemayoran	Rp 56.628.375.000
Jumlah			Rp 56.628.375.000

Peralatan dan Mesin
Rp17,934,462,897

C.6 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp17,934,462,897 dan Rp18.701.646.447. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	18,701,646,447
Mutasi tambah:	1,055,056,200
Mutasi kurang:	(1,822,239,750)
Saldo per 31 Desember 2025	17,934,462,897
Akumulasi Penyusutan	(15,935,893,728)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1,998,569,169

Mutasi tambah terdiri atas transaksi Transfer Masuk sejumlah 29 unit komputer dengan nilai sebesar Rp249.606.800, sedangkan mutasi kurang senilai Rp(1,822,239,750). Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Rp34.110.464.115

C.7 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp34.110.464.115 dan Rp34.110.464.115. Selama periode TA 2025 tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang gedung dan bangunan pada Kanwil DJBC Jakarta yang dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	34,110,464,115
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	34,110,464,115
Akumulasi Penyusutan	(7,364,771,298)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	26,745,692,817

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp0

C.8 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember

2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Selama periode TA 2025 tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang jalan, irigasi, dan jaringan pada Kanwil DJBC Jakarta yang dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan
Rp(23,300,665,026)

C.9 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp(23,300,665,026) dan Rp(23.713.986.517). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	56,628,375,000	0	56,628,375,000
2	Peralatan dan Mesin	17,934,462,897	(15,935,893,728)	1,998,569,169
3	Gedung dan Bangunan	34,110,464,115	(7,364,771,298)	26,745,692,817
4	Jaringan	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		108,673,302,012	(23,300,665,026)	85,372,636,986

Piutang Jangka Panjang
Rp0

C.10 Piutang Jangka Panjang

Saldo Piutang Jangka Panjang Kanwil DJBC Jakarta per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Lain-Lain
Rp1.539.199.063

C.11 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp1.539.199.063 dan Rp468.062.663. Aset Lain-Lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional.

Adapun mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	468,062,663
Mutasi tambah:	1,822,239,750
Mutasi kurang:	(751,103,350)
Saldo per 31 Desember 2025	1,539,199,063
Akumulasi Penyusutan	(1,539,199,063)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Mutasi tambah terdiri atas transaksi Reklasifikasi dengan nilai sebesar Rp249.606.800, sedangkan mutasi kurang berupa Pencatatan BMN yang Mau Dihapuskan senilai Rp(751.103.350). Rincian Aset Lain-Lain disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp2.897.800

C.12 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp2.897.800 dan Rp93.214.573. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja barang yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun Utang Pihak Ketiga pada Kantor Wilayah DJBC Jakarta per tanggal pelaporan merupakan Belanja Langganan Air bulan Desember yang akan dibayarkan di Januari 2026 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

NO	Uraian	TA 2025	TA 2024
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
2	Belanja Barang yang Masih harus dibayar	2,897,800	93,214,573
3	Belanja Modal yang Masih harus dibayar	-	-
4	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	-	-
	Total	2,897,800	93,214,573

Utang yang Belum
Ditagihkan
Rp0

C.13 Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang yang Belum ditagihkan merupakan utang yang belum diterima tagihannya yang dibayarkan menggunakan Uang Persediaan (UP) oleh Bendahara Pengeluaran.

Uang Muka dari KPPN
Rp0

C.18 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Ekuitas
Rp85.454.019.755

C.20 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp85.454.019.755 dan Rp85.824.069.136. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
Perpajakan
Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan PNBP
Rp0

D.2 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp15.000.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa, Tanah, Gedung dan Bangunan (Rumah Dinas)	-	-	0%
Pendapatan Bunga Lainnya	-	-	0%
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	0%
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	15,000,000	-100%
Jumlah	-	15,000,000	-100%

Pendapatan Negara Bukan Pajak merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Pendapatan PNBP Lainnya.

Pendapatan Hibah
Rp0

D.3 Pendapatan Hibah

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Pegawai
Rp0

D.4 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban ini sudah tersentralisasi/berpindah dari satker Kanwil DJBC Jakarta ke Eselon I/ Kantor Pusat DJBC.

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	0	-	0%
Beban Tunjangan-Tunjangan	0	-	0%
Beban Lembur	0	-	0%
Beban Uang Makan	0	-	0%
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	-	0%
Pengembalian Beban Tunjangan Struktural PNS	0	-	0%
Jumlah	-	-	0%

Beban Persediaan
Rp259.965.194

D.5 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Kantor Wilayah DJBC Jakarta per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp259.965.194 dan Rp846.632.288. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN)	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	231,341,694	779,177,203	(547,835,509)	-70%
Beban Persediaan Amunisi	14,737,300	22,713,789	(7,976,489)	-35%
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-	0%
Beban Persediaan Lainnya	13,886,200	44,741,296	(30,855,096)	0%
Jumlah Beban Persediaan	259,965,194	846,632,288	(586,667,094)	-69%

Beban Persediaan mengalami penurunan sebesar Rp(586.667.094) atau sebesar 69% dan penurunan terbesar secara persentase terdapat pada Beban Persediaan Konsumsi yang mengalami penurunan Rp(547.835.509) atau sebesar 70%. Untuk menilai kewajaran atas saldo beban persediaan LO, telah dilakukan mapping beban persediaan dengan menambah saldo persediaan awal tahun ditambah pembelian tahun berjalan dikurangi saldo persediaan akhir tahun. Kemudian disesuaikan dengan saldo exclude mapping beban persediaan, sebagaimana disajikan secara wajar melalui perhitungan pada rincian tabel berikut:

Mapping Beban Persediaan per 31 Desember 2025

Pemakaian	Beban Persediaan LO	259,965,194
Pembelian	Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA) (termasuk 523xxx)	103,796,371
	Saldo Persediaan Awal Tahun	190,784,664
	Saldo Persediaan Akhir (-)	(84,280,569)
Excluded mapping beban persediaan		
	Transfer Masuk (M13)	84,927,580
	Transfer Keluar (K13+M95)	-
391113	Koreksi Persediaan (-)	-
491421	Pendapatan Sitaan/Rampasan (-)	-
491511	Pendapatan PNP (-)	-
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan (-)	(35,262,852)
593114	Beban Persediaan suku cadang (-)	-
593121	Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges (-)	-
593128	Beban Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan (BMMN: Telah Laku Lelang/Hibah) (-)	-
593311	Beban PNP (-)	-
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset (Perubahan Peruntukan BMMN: Pemusnahan) (-)	-
596121	Beban Persediaan Rusak/Usang (-)	-
	Salah Belanja (substansi persediaan)	-
	UYBDT	-
	YMHD	-
	Lain-lain:	
	Reklasifikasi dari Aset Tetap	-
	Reklasifikasi ke Aset Tetap	-
	Perolehan Lainnya	-
		259,965,194
	Selisih	0

Beban Barang dan
Jasa
Rp3.306.667.207

D.6 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa yang berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.306.667.207 dan Rp4.379.386.122, sehingga terdapat penurunan sebesar Rp(1.072.718.915) atau sebesar 24,49%. Adapun Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagaimana rincian tabel berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Akun	Akun	2025	2024	Naik/(Turun)	% NAIK/(TURUN)
521111	Beban Keperluan Perkantoran	2,333,996,055	2,443,189,380	(109,193,325)	-4.47%
521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	-	-	0	-
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	8,133,000	27,550,200	(19,417,200)	-70.48%
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,617,500	8,098,099	(1,480,599)	-18.28%
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	70,531,001	53,352,000	17,179,001	32.20%
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	58,000,000	92,870,000	(34,870,000)	-37.55%
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	0	-
521211	Beban Bahan	77,709,100	102,649,570	(24,940,470)	-24.30%
521213	Beban Honor Output Kegiatan	-	-	0	-
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	369,688,201	216,497,261	153,190,940	70.76%
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	-	-	0	-
521254	Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	-	-	0	-
522111	Beban Langganan Listrik	-	1,137,996,636	(1,137,996,636)	-100.00%
522112	Beban Langganan Telepon	-	1,546,156	(1,546,156)	-100.00%
522113	Beban Langganan Air	47,211,650	29,701,410	17,510,240	58.95%
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	-	-	0	-
522131	Beban Jasa Konsultan	-	-	0	-
522141	Beban Sewa	197,280,700	209,464,250	(12,183,550)	-5.82%
522151	Beban Jasa Profesi	137,500,000	26,550,000	110,950,000	417.89%
522191	Beban Jasa Lainnya	-	29,921,160	(29,921,160)	-100.00%
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	0	-
	Jumlah	3,306,667,207	4,379,386,122	(1,072,718,915)	-24.49%

Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional terbentuk dari Belanja Barang dan Jasa LRA sebesar Rp3.303.769.407 ditambah/dikurangi dengan penyesuaian akrual yaitu Utang Yang Belum Ditagihkan sebesar Rp0, Belanja yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp2.897.800, Belanja Barang Dibayar Dimuka sebesar Rp0, dan penyesuaian akrual lainnya sebesar Rp0 yang terbentuk karena penyesuaian atas belanja langganan air bulan Desember 2025 yang masih harus dibayar di bulan Januari 2026. Adapun penyesuaian akrual Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebagaimana rincian tabel berikut:

Kode Akun	Uraian Jenis Beban	LRA	Saldo Awal YMHD	Saldo Akhir YMHD	LO
		(a)	(b)	(c)	(g) = (a)+(b)+(c)
521111	Beban Keperluan Perkantoran	2,333,996,055	0	0	2,333,996,055
521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	0	0	0	0
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	8,133,000	0	0	8,133,000
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,617,500	0	0	6,617,500
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	70,531,001	0	0	70,531,001
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	58,000,000	0	0	58,000,000
521211	Beban Bahan	77,709,100	0	0	77,709,100
521213	Beban Honor Output Kegiatan	0	0	0	0
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	369,688,201	0	0	369,688,201
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	0	0	0

521254	Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	0	0	0	0
522111	Beban Langganan Listrik	0	0	0	0
522112	Beban Langganan Telepon	0	0	0	0
522113	Beban Langganan Air	44,313,850	0	2,897,800	47,211,650
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	0	0	0
522131	Beban Jasa Konsultan	0	0	0	0
522141	Beban Sewa	197,280,700	0	0	197,280,700
522151	Beban Jasa Profesi	137,500,000	0	0	137,500,000
522191	Beban Jasa Lainnya	0	0	0	0
Jumlah		3,303,769,407	0	2,897,800	3,306,667,207

D.7 Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp1.455.916.492

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.455.916.492 dan Rp1.756.371.050. Dengan demikian, terdapat penurunan sebesar Rp(300.454.558) atau sebesar 17,11%. Adapun beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagaimana rincian berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Akun	Akun	2025	2024	Naik/(Turun)	% NAIK/(TURUN)
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	910,725,410	892,182,064	18,543,346	2.08%
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	-	-	0	-
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	509,928,230	841,710,864	(331,782,634)	-39.42%
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	-	-	0	-
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	-	-	0	-
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	35,262,852	22,478,122	12,784,730	56.88%
593114	Beban Persediaan suku cadang	-	-	0	-
595113	Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	-	-	0	-
Jumlah		1,455,916,492	1,756,371,050	(300,454,558)	-17.11%

Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional terbentuk dari belanja pemeliharaan LRA sebesar Rp1.420.653.640 ditambah Utang Yang Belum Diterima Tagihannya sebesar Rp0, ditambah Belanja Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp0, dikurang belanja dibayar dimuka sebesar Rp0, ditambah penyesuaian akrual lainnya sebesar Rp0 dan ditambah beban akrual (kode akun 59) sebesar Rp35.262.852. Adapun penyesuaian akrual Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebagaimana rincian tabel berikut:

Kode Akun	Uraian Jenis Beban	LRA	YMHD	Beban Akrual	LO
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	910,725,410	0	0	910,725,410
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	0	0

523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	509,928,230	0	0	509,928,230
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	0	0	0	0
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	0	0
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0	35,262,852	35,262,852
593114	Beban Persediaan suku cadang	0	0	0	0
Jumlah		1,420,653,640	0	35,262,852	1,455,916,492

Beban Perjalanan
Dinas
Rp824.403.683

D.8 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp824.403.683 sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar dan Rp1.083.324.008. Dengan demikian, terdapat penurunan sebesar Rp(258,920,325) atau sebesar 23,90%. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi karena perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Adapun Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat sebagaimana rincian tabel berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Akun	Akun	2025	2024	Naik/(Turun)	% NAIK/(TURUN)
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	629,055,683	607,824,008	21,231,675	3.49%
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	195,348,000	475,500,000	(280,152,000)	-58.92%
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	0	-
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	0	-
524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	-	-	0	-
Jumlah		824,403,683	1,083,324,008	(258,920,325)	-23.90%

Beban Perjalanan Dinas yang terdapat dalam Laporan Operasional terbentuk dari belanja Perjalanan Dinas LRA sebesar Rp824.403.683 ditambah Utang Yang Belum Diterima Tagihannya sebesar Rp0, ditambah Belanja Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp0. Adapun penyesuaian akrual Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebagaimana rincian tabel berikut:

Kode Akun	Uraian Jenis Beban	LRA	LO
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	629,055,683	629,055,683
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	195,348,000	195,348,000
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0
524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	0
Jumlah		824,403,683	824,403,683

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp1.381.401.309

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk

mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp1.381.401.309 sedangkan untuk 31 Desember 2024 sebesar Rp1.249.812.220, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp1.249.812.220 atau sebesar 10,53%. Adapun Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat sebagaimana rincian tabel berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Akun	Akun	2025	2024	Naik/(Turun)	% NAIK/(TURUN)
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	578,113,291	446,524,202	131,589,089	29.47%
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	803,288,018	803,288,018	0	0.00%
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
591312	Beban Penyusutan Irigasi	-	-	-	-
591313	Beban Penyusutan Jaringan	-	-	-	-
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
592115	Beban Amortisasi Software	-	-	-	-
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-
Jumlah		1,381,401,309	1,249,812,220	131,589,089	10.53%

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp 0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp0 dan untuk 31 Desember 2024 sebesar Rp0, sehingga terdapat kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau sebesar 0%. Adapun nilai beban penyisihan piutang tak tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagaimana rincian tabel berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Akun	Akun	2025	2024	Naik/(Turun)	% NAIK/(TURUN)
594112	Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	0	0	0	-
594113	Beban Penyisihan Piutang PPN	0	0	0	-
594114	Beban Penyisihan Piutang PPhBM	0	0	0	-
594116	Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	0	0	0	-
594117	Beban Penyisihan Piutang Pajak Lainnya	0	0	0	-
594118	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	-
594211	Beban Penyisihan Piutang PNBPNP	0	0	0	-
594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	0	0	-
594411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar	0	0	0	-
594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang -Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	0	0	-
Jumlah		0	0	0	-

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp5.980.000

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	2,380,000	166,282,886	100%
Pendapatan dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya	3,600,000	3,600,000	0%
Beban dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya	-	-	n/a
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	5,980,000	169,882,886	-96%

Pos Luar Biasa
Rp0

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2025 dan 2024.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp85.824.069.136

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp85.824.069.136 dan Rp86.078.765.887.

Defisit LO
Rp(7.222.373.885)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp(7.222.373.885) dan Rp(9.130.642.802). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025.

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
Rp 0

E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Penyesuaian Nilai Aset untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Koreksi Nilai Persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Selisih Revaluasi Aset untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Lain-Lain untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp6.852.324.504

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.852.324.504 dan Rp8.875.946.051. Rincian Nilai Transaksi antar Entitas terdiri dari:

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(5,980,000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	5,652,623,101
Transfer Masuk	1,112,466,830
Transfer Keluar	93,214,573
Jumlah	6,852,324,504

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp(5.980.000) sedangkan DKEL sebesar Rp5.652.623.101.

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L dan antara K/L dengan Satuan Kerja. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 Transfer Masuk sebesar Rp1.112.466.830 dan Transfer Keluar sebesar Rp93.214.573.

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp85.454.019.755 dan Rp85.824.069.136.

Ekuitas Akhir

Rp85.454.019.755

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Tidak adanya Daftar temuan dan tindak lanjut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kanwil DJBC Jakarta.

F.2 REKENING PEMERINTAH

Kanwil DJBC Jakarta sampai dengan periode 31 Desember 2025 memiliki 2 (dua) rekening yang masih digunakan yaitu rekening pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nama rekening BPg 019 Kanwil DJBC Jakarta dengan nomor rekening 1256-01-000026-30-5 yang digunakan untuk menampung uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran serta menampung selain hal tersebut berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya, dan RPL019 Kanwil DJBC Jakarta dengan nomor rekening 1256-01-000032-30-6 untuk menampung Dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan unsur TKPKN.

F.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan data SAI yang ada pada aplikasi SAKTI dengan data SAU melalui monitoring rekonsiliasi yang terdapat pada aplikasi MONSAKTI.

Setiap UAKPA agar menyelesaikan rekonsiliasi dan mendapatkan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR). SHR akan diterbitkan setelah satuan kerja melakukan tutup buku modul Persediaan dan modul Aset Tetap serta melakukan tutup permanen modul GLP sampai dengan periode yang ditentukan.

Proses penyusunan Laporan Keuangan baik tingkat UAKPA, tingkat UAPPA-W dan UAPPA-E1, sesuai Surat Direntur Jenderal Perbendaharaan diatas dilakukan melalui cetakan pada Aplikasi SAKTI, mengingat sudah seluruh Kementerian/Lembaga menggunakan Aplikasi SAKTI.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.

Informasi pendapatan dan belanja secara akrual tingkat pemerintah pusat merupakan suplemen yang dilampirkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahunan, secara berjenjang dari mulai UAKPA sampai dengan UAPA.

Secara Umum transaksi pendapatan secara akrual terdiri dari:

1. Pendapatan yang masih harus diterima (disajikan sebagai penambah pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai piutang di neraca); dan/atau
2. Pendapatan diterima dimuka (disajikan sebagai pengurang pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca).

Pendapatan akrual pada Kanwil DJBC Jakarta per 31 Desember 2025 adalah Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar.

F.4 DATA PENDAPATAN PERPAJAKAN DAN MONITORING SP3DRI

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Rekonsiliasi Data Transaksi Penerimaan Negara, rekonsiliasi data transaksi penerimaan perpajakan mulai periode Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan secara terpusat menggunakan Aplikasi Rekonsiliasi yang disediakan oleh Direktorat SITP Ditjen Perbendaharaan. Rekonsiliasi penerimaan perpajakan dilaksanakan secara bersamaan untuk unit Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Rekonsiliasi dilaksanakan dengan membandingkan data pada Instansi Pemerintah Pemilik Tagihan (IPPT) Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (SAI) dengan data GL-SPAN (SAU).

Proses rekonsiliasi penerimaan perpajakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diawali dengan push data penerimaan yang bersumber dari Aplikasi CEISA ke portal SLDK yang dilakukan oleh Direktorat IKC Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Rekonsiliasi dijalankan oleh Direktorat SITP Ditjen Perbendaharaan berdasarkan data SAI DJBC yang telah tersedia pada portal SLDK dengan data GL-SPAN. Output hasil rekonsiliasi tersebut dikonfirmasi terlebih dahulu kepada DJBC manakala terdapat selisih SAI atau SAU. Selanjutnya saat kedua pihak telah mendapatkan kesepakatan atas angka hasil rekonsiliasi beserta

penjelasannya, maka segera dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPPN Khusus Penerimaan dan Direktorat SITP Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Atas hasil rekonsiliasi tersebut, Kantor Wilayah DJBC Jakarta sebagai satuan kerja DJBC menerima interkoneksi data penerimaan dari Direktorat PPS kemudian memastikan kesesuaian hasil interkoneksi dengan kertas kerja yang disediakan oleh kantor pusat DJBC.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 tentang tata cara Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai, Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI) merupakan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor berupa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan dari Kepala Kantor Pabean (KPPBC/KPU BC) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah penanggung. Penanggung yang tidak melunasi kewajibannya atas tagihan surat penetapan/surat keputusan/surat tagihan dalam jangka waktu (paling cepat) 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran (60 hari sejak tanggal penetapan atau keputusan) dan tidak sedang mengangsur/menunda pembayaran berdasarkan persetujuan, tidak mengajukan keberatan atau tidak mengajukan banding, maka Pejabat Bea dan Cukai (Kepala Kantor Pelayanan) akan menerbitkan surat teguran. Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dikeluarkan Surat Teguran tersebut penanggung belum melunasi kewajibannya, maka Kepala Kantor Pabean pada hari kerja berikutnya harus: 1. menerbitkan surat paksa untuk penagihan piutang Bea Masuk, Cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga kepada penanggung; 2. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Dalam rangka impor (SP3DRI) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah penanggung.

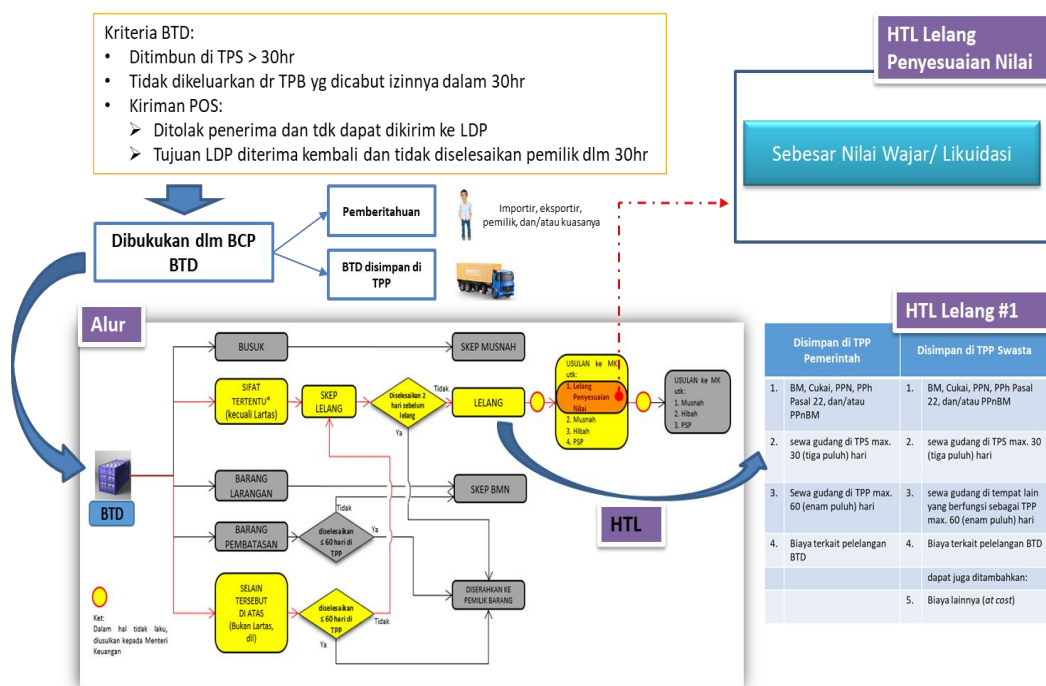
Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-22/BC/2009 diatur mengenai petunjuk pelaksanaan penyampaian SP3DRI yang meliputi: 1. Penegasan bahwa SP3DRI disampaikan pada hari kerja berikutnya setelah dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu)

hari sejak dikeluarkan Surat Teguran, dimana penanggung belum melunasi kewajibannya; 2. Penyampaian SP3DRI disertai dengan: a. Surat Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-25/BC/2009 tanggal 18 Mei 2009; dan b. Risalah Penetapan Pejabat. 3. SP3DRI disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah penanggung, yaitu KPP yang mengawasi sesuai dengan domisili dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 4. Melaporkan hasil tindak lanjut SP3DRI setiap bulannya kepada Direktur Jenderal.

Kantor Pelayanan Pajak yang menerima SP3DRI kemudian melakukan langkah-langkah sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-65/PJ/2015 tanggal 20 Oktober 2015 tentang Penatausahaan, Tindak Lanjut, dan Pengawasan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI). Dalam SE tersebut antara lain diatur bahwa Kantor Pelayanan Pajak dapat melakukan himbuan, penelitian/pemeriksaan dan/atau menerbitkan SKPKB atas pajak-pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam SP3DRI tersebut. SP3DRI yang ditindak lanjuti dengan SKPKB akan menambah piutang pajak dalam Laporan Perkembangan Piutang dari masing-masing KPP.

F.5 BMN EKS KEPABEANAN DAN CUKAI

Kriteria, alur proses dan penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD), Barang yang Dikuasai Negara (BDN), dan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019. Kriteria, alur proses pengelolaan dan penyelesaian BTD dapat digambarkan sebagai berikut.



a. BTD dapat dilelang jika:

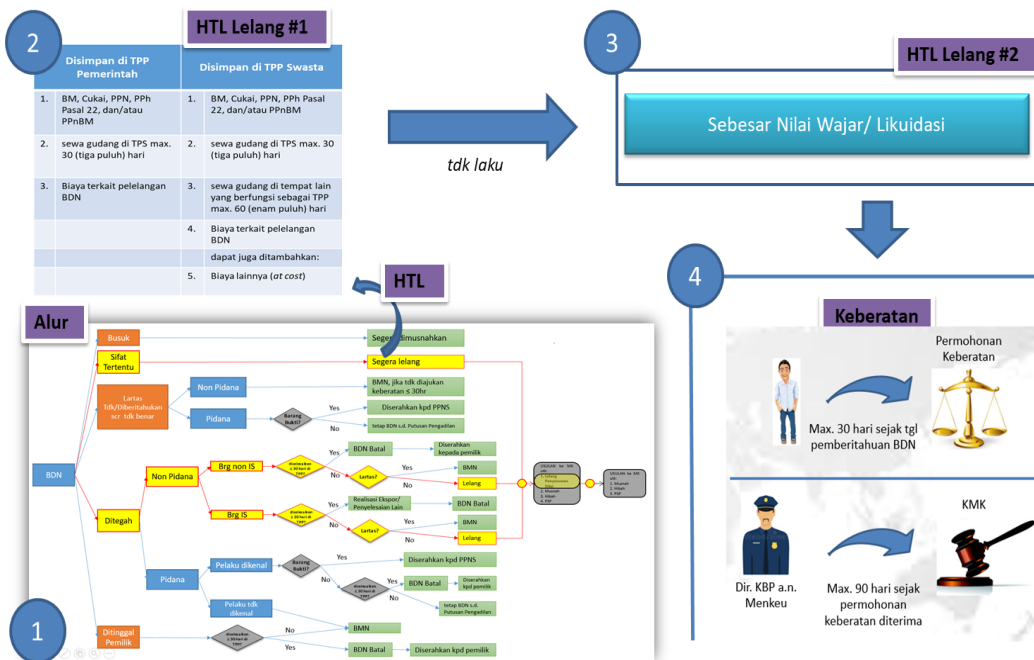
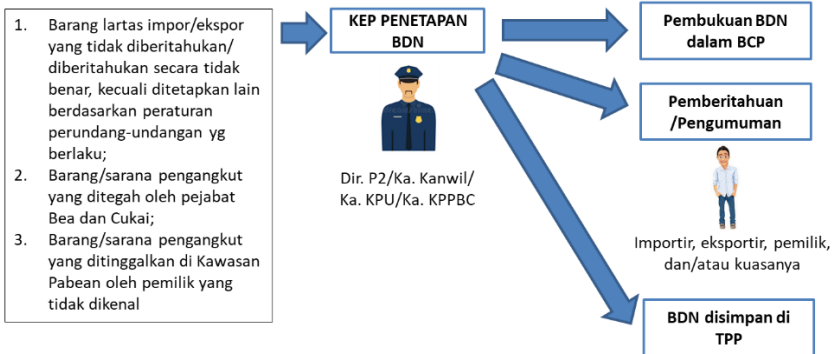
- 1) Secara peraturan barang tersebut bukan larangan, bukan pembatasan, dan memiliki sifat tidak tahan lama, merusak, berbahaya dan pengurusannya memerlukan biaya tinggi; dan
- 2) Secara peraturan barang tersebut bukan larangan, bukan pembatasan, namun tidak memiliki karakteristik sifat barang sebagaimana huruf a 1), dan tidak diselesaikan kewajibannya dalam ≤ 60 hari sejak ditimbun di Tempat Penimbunan Pabean (TPP).

b. BTD ditetapkan sebagai BMN apabila:

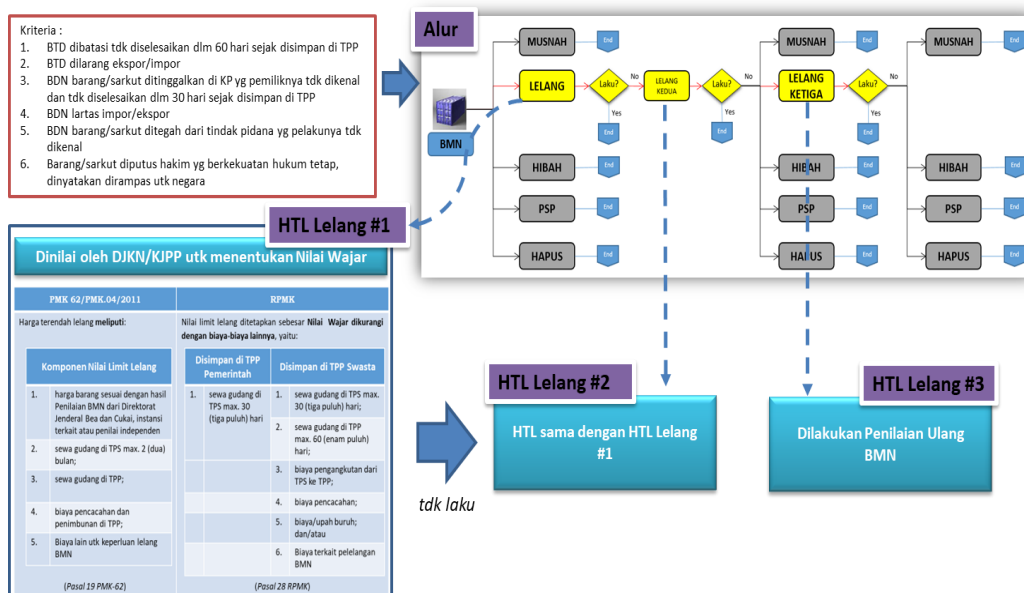
- 1) Barang yang sesuai ketentuan termasuk dalam kategori barang larangan,
- 2) Barang yang sesuai ketentuan termasuk dalam kategori barang dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam ≤ 60 hari sejak ditimbun di TPP.

Kriteria, alur proses pengelolaan dan penyelesaian BDN adalah sebagai berikut:

KRITERIA BDN:



Sedangkan kriteria, alur proses pengelolaan dan penyelesaian BMMN adalah sebagai berikut.



Berdasarkan prinsip kendali dan pemindahan kepemilikan, BTD dan BDN belum memenuhi kriteria sebagai aset sedangkan BMMN memenuhi kriteria pengakuan aset. Berdasarkan alur proses BTD, BDN dan BMMN tersebut, BTD dan BDN belum memenuhi kriteria sebagai aset karena belum adanya transfer kepemilikan kepada Pemerintah. BMMN secara kendali dan kepemilikan telah beralih kepada Pemerintah sehingga memenuhi kriteria pengakuan aset.

Selain PMK Nomor 178/PMK.04/2019 dalam penatausahaan dan penyelesaian BMMN, DJBC berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai. PMK 51/PMK.06/2021 merupakan ketentuan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang. Pada kedua PMK tersebut dinyatakan bahwa yang menjadi aset negara dan perlu diungkapkan/disajikan dalam Laporan Keuangan DJBC adalah BMMN.

Berdasarkan Diktum Kelima Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Petunjuk Teknis Pencatatan Aset yang Berasal dari Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan bahwa **mulai Tahun 2023** aset yang berasal dari BTD, BDN, dan BMMN **disajikan pada Neraca untuk persetujuan Lelang, Hibah, serta Penetapan Status Penggunaan** sedangkan aset yang berasal dari BTD, BDN, dan BMMN **yang belum mendapatkan persetujuan atau yang mendapatkan persetujuan pemusnahan atau penghapusan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan** Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015.

Penatausahaan dan pengelolaan BTD, BDN dan BMMN di lingkungan DJBC disusun oleh masing-masing satker dalam bentuk *excel atau google spreadsheet*. Hal ini berdampak pada tingkat akurasi dan keamanan data BTD, BDN dan BMMN yang dikelola oleh DJBC. Aplikasi CEISA Manifest yang digunakan untuk monitoring pos manifest yang terbuka dan pengelolaan BTD, BDN, BMMN saat ini masih dalam proses pengembangan.

Mekanisme penyajian data BMMN mengikuti ketentuan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-10/BC/2024 meliputi

pencatatan dan pemutakhiran data serta pengungkapannya. Proses validasi data BMMN Tahun 2025 dilakukan dengan cara melakukan pengecekan saldo awal BMMN dengan *outstanding* data BMMN per 31 Desember 2024 dan membandingkan data peruntukan BMMN dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh DJKN selaku Pengelola Barang.

Data yang diungkapkan pada Laporan Keuangan Tahun 2025 memiliki keterbatasan dalam hal nilai, validitas, dan kelengkapan. Adapun keterbatasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tidak semua barang yang telah ditetapkan menjadi milik negara memiliki nilai perkiraan, hal ini disebabkan karena secara ketentuan yang diatur dalam pasal 32 PMK 178/PMK.04/2019 nilai perkiraan barang baru digunakan pada saat pengajuan usulan peruntukan dari DJBC ke Pengelola Barang;
2. Validitas dan kelengkapan data perlu diuji lebih lanjut dengan pengecekan fisik langsung.

Berdasarkan hasil kompilasi data BMMN dari Kantor Wilayah DJBC Jakarta, serta validasi saldo awal dan persetujuan peruntukan BMMN dari DJKN, data BMMN *outstanding* per 31 Desember 2025 yaitu 0 SKEP BMMN dengan nilai sebesar Rp0. Adapun ringkasan mutasi data BMMN pada TA 2025 Audited disajikan sebagaimana tabel 1.

Tabel 1. Mutasi BMMN pada Tahun 2025 Audited

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Limit
1	Saldo Awal BMMN	0	0
2	Koreksi Saldo Awal	0	0
3	Mutasi Terbit BMMN TA 2025 Audited	157	23,308,137,140
4	Penyelesaian BMMN TA 2025 Audited	-157	-23,308,137,140
5	Outstanding per 31 Desember 2025	0	0

Untuk jumlah SKEP BMMN pada saldo awal TA 2025 Audited sama dengan pengungkapan data *outstanding* pada Laporan Keuangan *Audited* TA 2024 dimana pada LK tahun sebelumnya dilaporkan sebanyak 0 SKEP BMMN *outstanding*.

Adapun rincian mutasi BMMN Audited Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Koreksi Saldo Awal

Pada saat penyusunan Laporan Tahun 2025, tidak ditemukan adanya ketidaksesuaian data *outstanding* BMMN per 31 Desember 2025 dengan pencatatan yang dilakukan satker sehingga menyebabkan adanya koreksi saldo awal. Adapun rincian Koreksi Saldo Awal BMMN disajikan sebagaimana tabel 2.

Tabel 2. Koreksi Saldo Awal BMMN Audited Tahun 2025

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Limit
1	Data <i>outstanding</i> BMMN Audited per 31 Des 2024	0	0

2	Koreksi Pencatatan	0	0
3	Koreksi Nilai	0	0
4	Data BMMN yang diselesaikan pada Tahun 2024 atau Tahun Sebelumnya	0	0
5	Data BMMN yang tidak tercatat sebagai data outstanding BMMN Audited per 31 Desember 2024	0	0
6	Lebih dari satu status koreksi saldo awal	0	0
Data Saldo Awal BMMN Setelah Koreksi		0	0

- a) Tidak terdapat koreksi pencatatan.
- b) Tidak terdapat kesalahan pencatatan nilai perkiraan atau nilai wajar.
- c) Tidak ada data BMMN yang telah diselesaikan pada tahun 2024 atau tahun sebelumnya yang masih tercatat sebagai data outstanding per 31 Desember 2025;
- d) Adanya data BMMN yang terbit sebelum Tahun 2025 dan belum diselesaikan s.d 31 Desember 2025 namun tidak tercantum sebagai data outstanding BMMN per 31 Desember 2025.

2. Mutasi Audited Tahun 2025

Pada Audited Tahun 2025 telah terbit 157 SKEP BMMN dengan nilai sebesar Rp23.308.137.140 dan telah dilakukan penyelesaian BMMN sebanyak 157 Persetujuan Peruntukan dengan nilai sebesar Rp23.308.137.140. Adapun rincian mutasi terbit dan penyelesaian BMMN disajikan sebagaimana tabel 3.

Tabel 3. Mutasi Terbit dan Penyelesaian BMMN Tahun 2025 Audited

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Limit
1	Mutasi Terbit BMMN TA 2025 Audited	157	23,308,137,140
2	Penyelesaian BMMN TA 2025 Audited	157	23,308,137,140
	a. Hibah	0	0
	b. Pembatalan SKEP BMMN	0	0
	c. Pemusnahan	157	23,308,137,140
	d. Penetapan Status Penggunaan	0	0
	e. Penghapusan	0	0
	f. Penjualan Secara Lelang	0	0

Penyelesaian BMN Tahun 2025 Audited terdiri dari peruntukan berikut ini.

- a. Tidak terdapat Hibah;
- b. Tidak terdapat pembatalan SKEP BMN pada Tahun 2025.

- c. Terdapat Pemusnahan diperuntukan bagi BMMN yang tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dihibahkan, atau yang tidak mempunyai nilai ekonomis atau yang dilarang diekspor atau diimpor atau yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dimusnahkan sebanyak 157 SKEP dengan nilai sebesar Rp23.308.137.140.
- d. Tidak terdapat Penetapan Status Penggunaan (PSP) diperuntukan bagi BMMN yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.
- e. Penghapusan merupakan peruntukan untuk menghapuskan pencatatan BMMN karena mengalami penyusutan atau hilang. Pada Tahun 2025 Audited belum terdapat Persetujuan Penghapusan atas BMMN.
- f. Tidak terdapat Penjualan Secara Lelang merupakan peruntukan yang secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. KEP BMMN Masih Belum Diselesaikan s.d. 31 Desember 2025

Adapun total SKEP BMMN yang belum diselesaikan s.d 31 Desember 2025 adalah sebanyak 0 SKEP BMMN dengan nilai sebesar Rp0 dengan rincian sebagaimana tabel 4.

Tabel 4. SKEP BMMN Masih Belum Diselesaikan s.d. 31 Desember 2025

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Limit
1	Hibah	0	0
2	Pemusnahan	0	0
3	Penjualan Secara Lelang	0	0
4	Belum Ada Peruntukan	0	0
Jumlah		0	0

Data Outstanding BMMN per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan bahwa jumlah SKEP BMMN yang belum mendapatkan SKEP Peruntukan adalah sebanyak 0 SKEP dengan nilai Rp0.

F.6 UPAYA HUKUM KEBERATAN, BANDING, DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pelaksanaan pemungutan Pajak yang tidak sesuai dengan Undang-undang Kepabeanan dan Cukai akan menimbulkan ketidakadilan terhadap Wajib Pajak, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya Sengketa Pajak antara Wajib Pajak dan pejabat yang berwenang. Terhadap sengketa pajak tersebut dapat dilakukan upaya hukum oleh wajib pajak berupa keberatan, banding, dan peninjauan kembali.

Pengajuan keberatan dilakukan dalam hal wajib pajak merasa tidak puas atau tidak tepat dalam penetapan pemungutan atau pemotongan pajak oleh Pejabat Bea dan Cukai. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.04/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai dapat dilakukan mengenai:

- a) tarif dan/ atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kekurangan pembayaran;
- b) selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk;
- c) pengenaan sanksi administrasi berupa denda; atau
- d) pengenaan bea keluar

Berdasarkan data dari Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan periode Tahun 2025, penetapan Kantor Wilayah DJBC Jakarta yang diajukan keberatan sebanyak 5 (lima) dokumen dengan status selesai dengan nilai sebesar Rp6.371.000.000, sebagaimana berikut.

Rincian Upaya Hukum Keberatan

Kantor Monitoring	Proses		Selesai	
	Dokumen	Nilai	Dokumen	Nilai
KANWIL JAKARTA	0	-	5	6,371,000,000
Total	0	-	5	6,371,000,000

Adapun rincian putusan keberatan yang sudah selesai sebagaimana tabel adalah:

1. Dicabut sebanyak 0 dokumen dengan nilai sebesar Rp0.
2. Menetapkan lain sebanyak 1 dokumen dengan nilai sebesar Rp1.217.220.000.
3. Mengabulkan sebanyak 0 dokumen dengan nilai sebesar Rp0.

- Menolak seluruhnya sebanyak 4 dokumen dengan nilai sebesar Rp5.153.780.000.

Rincian Proses Upaya Hukum Keberatan Sudah Selesai

No	Kantor Monitoring	Dokumen	Nilai Tagihan
1	Dicabut	0	-
2	Menetapkan Lain	1	1,217,220,000
3	Mengabulkan	0	-
4	Menolak Seluruhnya	4	5,153,780,000
Total		5	6,371,000,000

Adapun perubahan data pengajuan keberatan yang terdapat pada DJBC tersaji sebagaimana berikut.

Rincian Data Mutasi Upaya Hukum Keberatan

No	Keterangan	Dokumen	Nilai
1	Data Outstanding per 31 Desember 2024 (Audited)	5	6,371,000,000
2	Data Outstanding per 31 Desember 2024 (Audited)	5	6,371,000,000
3	Sudah Putusan sampai dengan 31 Desember 2025	5	6,371,000,000
Data Outstanding/Masih Dalam Proses per 31 Desember 2025		-	-

Selain upaya hukum keberatan, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam hal masih merasa tidak puas atas keputusan keberatan terkait pemungutan atau pemotongan pajak merupakan banding. Pengajuan banding disampaikan ke Pengadilan Pajak.

Berdasarkan data Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan periode Tahun 2025, penetapan Kantor Wilayah DJBC Jakarta yang diajukan banding masih dalam proses sebanyak 77 dokumen dengan nilai sebesar Rp374.837.071.867 dan pengajuan banding yang sudah mendapatkan putusan sebanyak 34 dokumen dengan nilai sebesar Rp107.492.334.067 sebagaimana berikut.

Rincian Upaya Hukum Banding

Kantor Penerbit Penetapan	Proses		Selesai	
	Dokumen	Nilai	Dokumen	Nilai
KANWIL JAKARTA	43	Rp267,344,737,800	34	Rp107,492,334,067
Total	43	267,344,737,800	34	107,492,334,067

Adapun rincian putusan banding yang sudah selesai adalah:

- Mebatalkan sebanyak 3 dokumen dengan nilai sebesar Rp51.682.920.137.
- Membetulkan sebanyak 0 dokumen dengan nilai sebesar Rp0.

3. Mencabut sebanyak 0 dokumen dengan nilai sebesar Rp0.
4. Mengabulkan sebagian sebanyak 4 dokumen dengan nilai sebesar Rp12.326.149.028.
5. Mengabulkan seluruhnya sebanyak 20 dokumen dengan nilai sebesar Rp2.915.903.627.
6. Menolak permohonan sebanyak 7 dokumen dengan nilai sebesar Rp40.567.361.275.
7. Pencabutan sebanyak 0 dokumen dengan nilai sebesar Rp0.
8. Tidak dapat diterima sebanyak 0 dokumen dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian Proses Upaya Hukum Banding Selesai

No	Kantor Monitoring	Dokumen	Nilai Tagihan
1	Membatalkan	3	Rp51,682,920,137
2	Membetulkan	0	-
3	Mencabut	0	-
4	Mengabulkan sebagian	4	Rp12,326,149,028
5	Mengabulkan seluruhnya	20	Rp2,915,903,627
6	Menolak Permohonan	7	Rp40,567,361,275
7	Pencabutan	0	-
8	Tidak dapat diterima	0	-
Total		34	107,492,334,067

Adapun perubahan data pengajuan banding yang terdapat pada Kantor Wilayah DJBC Jakarta tersaji sebagaimana berikut.

Rincian Data Mutasi Upaya Hukum Banding

No	Keterangan	Dokumen	Nilai
1	Data Outstanding per 31 Desember 2024	94	Rp305,331,328,231
2	Data sampai dengan 31 Desember 2024	77	Rp374,837,071,867
3	Sudah Putusan sampai dengan 31 Desember 2025	34	Rp107,492,334,067
Data Outstanding/Masih Dalam Proses per 31 Desember 2025		43	267,344,737,800

Pajak memegang peran penting dan strategis dalam penerimaan negara, oleh karena itu dalam penyelesaian Sengketa Pajak diperlukan jenjang pemeriksaan ulang vertikal yang lebih ringkas. Memperbanyak jenjang pemeriksaan ulang vertikal akan mengakibatkan potensi pengulangan pemeriksaan menyeluruh. Penyelesaian Sengketa Pajak selama ini, dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Namun, dalam pelaksanaan penyelesaian Sengketa Pajak melalui BPSP masih terdapat ketidakpastian

hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

Penyelesaian Sengketa Pajak harus dilakukan dengan adil melalui prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana. Oleh karena itu, dalam Undang-undang tentang Pengadilan Pajak ini ditentukan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, masih dimungkinkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung merupakan upaya hukum luar biasa, di samping akan mengurangi jenjang pemeriksaan ulang vertikal, juga penilaian terhadap kedua aspek pemeriksaan yang meliputi aspek penerapan hukum dan aspek fakta-fakta yang mendasari terjadinya sengketa perpajakan, akan dilakukan sekaligus oleh Mahkamah Agung.

Namun demikian dalam pengajuan Peninjauan Kembali terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. pengajuan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 91 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama Tahun 2025 terdapat penetapan-penetapan di DJBC yang sedang dalam proses upaya hukum (sengketa) Peninjauan Kembali. Proses upaya hukum tersebut diberikan dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban WP. Berdasarkan data Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan periode Tahun

2025, penetapan Kantor Wilayah DJBC Jakarta yang diajukan peninjauan kembali masih dalam proses sebanyak 49 dokumen dengan nilai sebesar Rp497,354,436,451 dan yang telah mendapatkan keputusan sebanyak 9 dokumen dan nilai sebesar Rp2.909.200.230 sebagaimana tabel berikut.

Rincian Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Kantor Penerbit	Proses		Selesai	
	Dokumen	Nilai	Dokumen	Nilai
KANWIL JAKARTA	40	Rp 494,445,236,221	9	Rp 2,909,200,230
Total	40	494,445,236,221	9	2,909,200,230

Adapun rincian putusan Peninjauan Kembali yang sudah selesai adalah :

1. DJBC menang sebanyak 1 dokumen dengan nilai sebesar Rp28.047.230.
2. DJBC kalah sebanyak 8 dokumen dengan nilai sebesar Rp2.881.153.000.

Rincian Proses Upaya Hukum Peninjauan Kembali Selesai

No	Status PK	Dokumen	Nilai Tagihan
1	DJBC Menang	1	Rp 28,047,230
2	DJBC Kalah	8	Rp 2,881,153,000
	Total	9	2,909,200,230

Adapun perubahan data pengajuan Peninjauan Kembali yang terdapat pada DJBC tersaji sebagaimana tabel berikut.

Rincian Data Mutasi Upaya Hukum Peninjauan Kembali

No	Keterangan	Dokumen	Nilai
1	Data Outstanding per 31 Desember 2024	110	Rp 1,581,805,040,803
2	Data Outstanding per 31 Desember 2024	110	Rp 1,581,805,040,803
3	31 Desember 2025	9	4,717,549,000
	Data Outstanding/Masih Dalam Proses per 31 Desember 2025	49	Rp 497,354,436,451

INFORMASI KINERJA UNIT ESELON I/KANWIL/SATKER TAHUN 2025 AUDITED

Unit Eselon I/Kanwil/Satker

: Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
015.05.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1,535,730,000	1,387,372,484	90.34					
4787	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	137,300,000	69,139,352	50.36					
4787.AEF.001	Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)	41,200,000	7,750,500	18.81	100.00	100.00	orang	100,00	Pagu blokir sebagian
4787.BIG.001	Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai	54,600,000	46,158,852	84.54	46.00	46.00	Laporan	100,00	Pagu blokir sebagian
4787.FAC.006	Pembinaan Di Bidang Kepabeanan dan Cukai	41,500,000	15,230,000	36.70	5.00	7.00	Unit kerja	100,00	Pagu blokir sebagian
4788	Penanganan Keberatan/ Banding/ Gugatan	28,800,000	26,000,000	90.28					
4788.BCE.002	Pendampingan Penanganan Perkara Kepabeanan dan Cukai	28,800,000	26,000,000	90.28	5.00	5.00	Perkara	100,00	
4789	Pengawasan dan Penegakan Hukum	1,369,630,000	1,292,233,132	94.35					
4789.BIG.001	Laporan Hasil Audit (LHA)	594,720,000	555,462,331	93.40	4.00	4.00	Laporan	100,00	Pagu blokir sebagian
4789.BIG.004	Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan	774,910,000	736,770,801	95.08	11.00	11.00	Laporan	100,00	Pagu blokir sebagian
015.05.WA	Program Dukungan Manajemen	6,239,084,000	4,265,250,617	68.36					
4695	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	6,180,884,000	4,228,564,617	68.41					
4695.CCF.001	Pemeliharaan Sarana Operasi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	87,750,000	61,266,450	69.82	27.00	27.00	Unit	100,00	Pagu blokir sebagian
4695.EBA.003	Kerumahtanggaan	52,000,000	27,378,500	52.65	12.00	12.00	Layanan	100,00	Pagu blokir sebagian
4695.EBA.994	Layanan Perkantoran	5,734,945,000	4,139,919,667	72.19	12.00	12.00	Layanan	100,00	Pagu blokir sebagian
4695.EBB.002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	306,189,000	0	0.00	61.00	0.00	Unit	0,00	Blokir pagu 100%
4697	Pengelolaan Organisasi dan SDM	28,200,000	28,150,000	99.82					
4697.EBC.001	Pengembangan SDM	28,200,000	28,150,000	99.82	5.00	5.00	Orang	100,00	
4698	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	30,000,000	8,536,000	28.45					
4698.EBD.001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	30,000,000	8,536,000	28.45	1.00	1.00	Rekomendasi	100,00	Pagu blokir sebagian
	Subtotal	7,774,814,000.00	5,652,623,101.00	72.7					
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll.)								
	Total	7,774,814,000.00							

*Keterangan: Penyesuaian dijelaskan secara memadai di dalam laporan keuangan

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUN 2025 (AUDITED)

Kode dan Nama UAKPA : (668906) Kanwil DJBC Jakarta
 Kode dan Nama UAPPAW : (0700) Kanwil DJBC Jakarta
 Kode dan Nama Eselon 1 : (05) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 Kode dan Nama K/L : (015) Kementerian Keuangan

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya	
<i>Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>				
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	v		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	v		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	v		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal	v		Ada
2	Neraca Percobaan AkruaI	v		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	v		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	v		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	v		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	v		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	v		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	v		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		v	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	v		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		v	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		v	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		v	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		v	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		v	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		v	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		v	Tidak

10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		v	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		v	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		v	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>				
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		v	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		v	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		v	Tidak
	a. Pagu/DIPA		v	Tidak
	b. Estimasi PNBPN		v	Tidak
	c. Belanja		v	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		v	Tidak
	e. Pendapatan		v	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		v	Tidak
	g. Kas BLU		v	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		v	Tidak
	i. Kas Hibah		v	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		v	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		v	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		v	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister')		v	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		v	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		v	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		v	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		v	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		v	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		v	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		v	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)		v	Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)		v	Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)		v	Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)		v	Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)		v	Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)		v	Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)		v	Ya

	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		v	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		v	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		v	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		v	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		v	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		v	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		v	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		v	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		v	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		v	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		v	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		v	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		v	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		v	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		v	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		v	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		v	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		v	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		v	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		v	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.			Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			Ada/Tidak

3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		v	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI		0	
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)		(1,019,252,257)	
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		v	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas ?		v	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?			Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?			Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		v	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?			Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		v	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya		v	Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar		v	Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN		v	Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening		v	Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito		v	Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		v	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?		v	Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		v	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		v	Tidak

2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) .		v	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		v	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	v		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		v	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	v		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak

PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Pengecekan Pos-pos LPE		Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	v		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		v	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		v	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	v		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	v		Ya

PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)

Pengecekan Pos-pos LRA/B/P		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		v	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		v	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		v	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		v	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		v	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		v	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Pyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		v	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		v	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		v	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		v	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		v	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	v		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	v		Ya/Tidak

4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	v		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	v		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	v		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	v		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	v		Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		v	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		v	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		v	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		v	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		v	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		v	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	v		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	v		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	v		Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?			Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,



Ditandatangani secara elektronik
Ajeng Wulandari Kusuma Dewi

Jakarta, 7 Mei 2026
Penelaah,



Ditandatangani secara elektronik
Nurul Mardiana



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

K/L : Kementerian Keuangan
 Eselon I : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (01505)
 Wilayah : Kantor Wilayah DJBC Jakarta (007)
 Satuan Kerja : Kantor Wilayah DJBC Jakarta (668906)
 Periode : TA 2025 Audited

No.	Tanggal	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Debit	Kredit	Keterangan
1	05/01/2025	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	93,214,573	-	Transfer Keluar Saldo Awal Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar 2024
		313211	Transfer Keluar	-	93,214,573	
2	30/6/2025	522113	Beban Langganan Air	3,863,800	-	Jurnal Belanja YMHD Manual atas tagihan air Semester I 2025
		212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	3,863,800	
3	09/01/2025	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	3,863,800	-	Jurnal Balik Belanja YMHD Manual atas tagihan air Semester I 2025
		522113	Beban Langganan Air	-	3,863,800	
4	31/12/2025	522113	Beban Langganan Air	2,897,800	-	Jurnal Belanja YMHD manual atas Beban Langganan Air Tahun 2025
		212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	2,897,800	

Kasubbag Tata Usaha dan Keuangan,

Operator GL dan Pelaporan,



Ditandatangani secara elektronik
 Nurul Mardiana



Ditandatangani secara elektronik
 Ajeng Wulandari Kusuma Dewi



MONITORING JURNAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE : 2025

KEMENTERIAN : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 05 DITJEN BEA DAN CUKAI
 WILAYAH/PROPINSI : 0700 Kanwil DJBC Jakarta
 SATUAN KERJA : 668906 KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA
 JENIS KEWENANGAN : KD KEMENTERIAN KEUANGAN

Tanggal : 25-02-2026
 Halaman : 1

TGL JURNAL	KODE BUKU BESAR	NO. DOK	DESKRIPSI TRANS	KODE COA	KODE AKUN	NAMA AKUN	KAS / AKRUAL	DEBET	KREDIT	TIPE JURNAL
01/05/2025	GLP-668906-436945912	00248/668906/GLP/2025	Transfer Keluar Saldo Awal Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar 2024	668906.019.212112.0150500.000000.0000000000.000000.2.0151.2.410640.000000	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	AKRUAL	93,214,573.00	0.00	Baru
01/05/2025	GLP-668906-436945912	00248/668906/GLP/2025	Transfer Keluar Saldo Awal Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar 2024	668906.019.313211.0150500.000000.0000000000.000000.2.0151.2.410640.000000	313211	Transfer Keluar	AKRUAL	0.00	93,214,573.00	Baru
30/06/2025	GLP-668906-448671827	00576/668906/GLP/2025	Jurnal Belanja YMHD Manual atas tagihan air Semester I 2025	668906.019.522113.0150500.000000.0000000000.000000.2.0151.2.000000.000000	522113	Belanja Langganan Air	AKRUAL	3,863,800.00	0.00	Baru
30/06/2025	GLP-668906-448671827	00576/668906/GLP/2025	Jurnal Belanja YMHD Manual atas tagihan air Semester I 2025	668906.019.212112.0150500.000000.0000000000.000000.2.0151.2.000000.000000	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	AKRUAL	0.00	3,863,800.00	Baru
01/09/2025	GLP-668906-467323991	00955/668906/GLP/2025	Jurnal Balik Belanja YMHD Manual atas tagihan air Semester I 2025	668906.019.212112.0150500.000000.0000000000.000000.2.0151.2.000000.000000	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	AKRUAL	3,863,800.00	0.00	Baru
01/09/2025	GLP-668906-467323991	00955/668906/GLP/2025	Jurnal Balik Belanja YMHD Manual atas tagihan air Semester I 2025	668906.019.522113.0150500.000000.0000000000.000000.2.0151.2.000000.000000	522113	Belanja Langganan Air	AKRUAL	0.00	3,863,800.00	Baru
31/12/2025	GLP-668906-515970010	01318/668906/GLP/2025	Jurnal Belanja YMHD manual atas Beban Langganan Air Tahun 2025	668906.019.522113.0150500.000000.0000000000.000000.2.0151.2.000000.000000	522113	Belanja Langganan Air	AKRUAL	2,897,800.00	0.00	Baru
31/12/2025	GLP-668906-515970010	01318/668906/GLP/2025	Jurnal Belanja YMHD manual atas Beban Langganan Air Tahun 2025	668906.019.212112.0150500.000000.0000000000.000000.2.0151.2.000000.000000	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	AKRUAL	0.00	2,897,800.00	Baru
								103,839,973.00	103,839,973.00	



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI DKI JAKARTA
KPPN JAKARTA II

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 668906 - KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 25/02/26 11:42

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	7,774,814,000	7,774,814,000	0
2	Belanja	5,652,673,101	5,652,673,101	0
3	Pengembalian Belanja	-50,000	-50,000	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	5,980,000	5,980,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN BEA DAN CUKAI 05
SATUAN KERJA : KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA 668906

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM
Tgl Cetak : 05/05/26 4:56 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	7,774,814,000	5,652,623,101	(2,122,190,899)	73	7,851,555,000	7,646,069,740	205,485,260	97
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

JAKARTA, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HENDRI DARNADI
NIP 197007121991031001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
ESELON I : 05 **DITJEN BEA DAN CUKAI**
WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA : 668906 **KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 05/05/26 5:00 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 5/5/26 2:07 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,669,835,000	2,912,260,000	2,333,996,055	0	2,333,996,055	80.14	578,263,945
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	28,800,000	24,702,000	8,133,000	0	8,133,000	32.92	16,569,000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,000,000	8,000,000	6,617,500	0	6,617,500	82.72	1,382,500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	73,992,000	94,171,000	70,531,001	0	70,531,001	74.9	23,639,999
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	107,600,000	122,500,000	58,000,000	0	58,000,000	47.35	64,500,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,884,227,000	3,161,633,000	2,477,277,556	0	2,477,277,556	78.35	684,355,444
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	84,500,000	117,500,000	77,709,100	0	77,709,100	66.14	39,790,900
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	271,698,000	388,114,000	369,688,201	0	369,688,201	95.25	18,425,799
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	356,198,000	505,614,000	447,397,301	0	447,397,301	88.49	58,216,699
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	72,000,000	123,500,000	71,828,271	0	71,828,271	58.16	51,671,729
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	18,000,000	22,900,000	13,886,200	0	13,886,200	60.64	9,013,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	90,000,000	146,400,000	85,714,471	0	85,714,471	58.55	60,685,529
5221	Belanja Jasa							
522113	Belanja Langganan Air	42,000,000	54,900,000	44,313,850	0	44,313,850	80.72	10,586,150
522141	Belanja Sewa	233,480,000	218,880,000	197,280,700	0	197,280,700	90.13	21,599,300
522151	Belanja Jasa Profesi	37,300,000	143,300,000	137,500,000	0	137,500,000	95.95	5,800,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	312,780,000	417,080,000	379,094,550	0	379,094,550	90.89	37,985,450
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	856,553,000	1,426,551,000	910,725,410	0	910,725,410	63.84	515,825,590
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	18,000,000	25,300,000	18,081,900	0	18,081,900	71.47	7,218,100
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	696,424,000	836,111,000	509,928,230	0	509,928,230	60.99	326,182,770
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,570,977,000	2,287,962,000	1,438,735,540	0	1,438,735,540	62.88	849,226,460
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	769,450,000	674,880,000	629,105,683	50,000	629,055,683	93.21	45,824,317
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	138,570,000	275,056,000	195,348,000	0	195,348,000	71.02	79,708,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	908,020,000	949,936,000	824,453,683	50,000	824,403,683	86.79	125,532,317
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	6,122,202,000	7,468,625,000	5,652,673,101	50,000	5,652,623,101	75.68	1,816,001,899
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
ESELON I : 05 **DITJEN BEA DAN CUKAI**
WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA : 668906 **KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 05/05/26 5:00 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 5/5/26 2:07 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	306,189,000	306,189,000	0	0	0	0	306,189,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	306,189,000	306,189,000	0	0	0	0	306,189,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	306,189,000	306,189,000	0	0	0	0	306,189,000
	JUMLAH BELANJA	6,428,391,000	7,774,814,000	5,652,673,101	50,000	5,652,623,101	72.7	2,122,190,899

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
ESELON I : 05 **DITJEN BEA DAN CUKAI**
WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA : 668906 **KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 05/05/26 5:01 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	2,380,000	0	2,380,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	2,380,000	0	2,380,000	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,600,000	0	3,600,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	3,600,000	0	3,600,000	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	5,980,000	0	5,980,000	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	5,980,000	0	5,980,000	

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN BEA DAN CUKAI
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (668906) KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 4:56 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	84,280,569	190,784,664	(106,504,095)	(55.82)
JUMLAH ASET LANCAR	84,280,569	190,784,664	(106,504,095)	(55.82)
ASET TETAP				
Tanah	56,628,375,000	56,628,375,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	17,934,462,897	18,701,646,447	(767,183,550)	(4.10)
Gedung dan Bangunan	34,110,464,115	34,110,464,115	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(23,300,665,026)	(23,713,986,517)	413,321,491	(1.74)
JUMLAH ASET TETAP	85,372,636,986	85,726,499,045	(353,862,059)	(0.41)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	1,539,199,063	468,062,663	1,071,136,400	228.84
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1,539,199,063)	(468,062,663)	(1,071,136,400)	228.84
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	85,456,917,555	85,917,283,709	(460,366,154)	(0.54)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	2,897,800	93,214,573	(90,316,773)	(96.89)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2,897,800	93,214,573	(90,316,773)	(96.89)
JUMLAH KEWAJIBAN	2,897,800	93,214,573	(90,316,773)	(96.89)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	85,454,019,755	85,824,069,136	(370,049,381)	(0.43)
JUMLAH EKUITAS	85,454,019,755	85,824,069,136	(370,049,381)	(0.43)
JUMLAH EKUITAS	85,454,019,755	85,824,069,136	(370,049,381)	(0.43)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	85,456,917,555	85,917,283,709	(460,366,154)	(0.54)

Keterangan :

FINAL

JAKARTA, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HENDRI DARNADI
NIP 197007121991031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN BEA DAN CUKAI

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (668906) KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 4:56 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	58,860,479	0
0.0	117112	Amunisi	8,450,255	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	16,969,835	0
0.0	131111	Tanah	56,628,375,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	17,934,462,897	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	34,110,464,115	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	15,935,893,728
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	7,364,771,298
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,539,199,063	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	1,539,199,063
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	2,897,800
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	5,652,623,101
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	5,980,000	0
0.0	313211	Transfer Keluar	0	93,214,573
0.0	313221	Transfer Masuk	0	1,112,466,830
0.0	391111	Ekuitas	0	85,824,069,136
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	2,380,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,600,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	2,333,996,055	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	8,133,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,617,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	70,531,001	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	58,000,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	77,709,100	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	369,688,201	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	47,211,650	0
3.0	522141	Beban Sewa	197,280,700	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	137,500,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	910,725,410	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	509,928,230	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	629,055,683	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	195,348,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	578,113,291	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	803,288,018	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	231,341,694	0
3.0	593112	Beban Persediaan amunisi	14,737,300	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	35,262,852	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	13,886,200	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN BEA DAN CUKAI
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (668906) KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM
Tgl Cetak : 05/05/26 4:56 PM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
JUMLAH			117,531,115,529	117,531,115,529

Keterangan :

FINAL

JAKARTA, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HENDRI DARNADI
NIP 197007121991031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN BEA DAN CUKAI

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (668906) KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA

Tgl Data : 05/05/26 12:37 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 4:56 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	5,652,623,101
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	5,980,000	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	2,380,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,600,000
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,333,996,055	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	8,133,000	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,617,500	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	70,531,001	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	58,000,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	77,709,100	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	369,688,201	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	71,828,271	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	13,886,200	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	44,313,850	0
3.0	522141	Belanja Sewa	197,280,700	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	137,500,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	910,725,410	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18,081,900	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	509,928,230	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	629,105,683	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	195,348,000	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	50,000
JUMLAH			5,658,653,101	5,658,653,101

Keterangan :

FINAL

JAKARTA, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HENDRI DARNADI

197007121991031001

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 05
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 668906

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN BEA DAN CUKAI
DKI JAKARTA
KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA

Tgl. Cetak 05/05/2026 5:01 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	142,863,422	0
0.0	117112	Amunisi	13,770,455	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	34,150,787	0
0.0	131111	Tanah	56,628,375,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	18,701,646,447	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	34,110,464,115	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	17,152,503,237
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	6,561,483,280
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	468,062,663	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	468,062,663
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	93,214,573
0.0	391111	Ekuitas	0	85,824,069,136
JUMLAH			110,099,332,889	110,099,332,889

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (05) DITJEN BEA DAN CUKAI
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (668906) KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 4:55 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	15,000,000	(15,000,000)	(100)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	15,000,000	(15,000,000)	(100)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	15,000,000	(15,000,000)	(100)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	259,965,194	846,632,288	(586,667,094)	(69.294)
Beban Barang dan Jasa	3,306,667,207	4,379,386,122	(1,072,718,915)	(24.495)
Beban Pemeliharaan	1,455,916,492	1,756,371,050	(300,454,558)	(17.107)
Beban Perjalanan Dinas	824,403,683	1,083,324,008	(258,920,325)	(23.901)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (05) DITJEN BEA DAN CUKAI
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (668906) KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 4:55 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,381,401,309	1,249,812,220	131,589,089	10.529
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	7,228,353,885	9,315,525,688	(2,087,171,803)	(22.405)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(7,228,353,885)	(9,300,525,688)	2,072,171,803	(22.28)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	2,380,000	166,282,886	(163,902,886)	(98.569)
Pendapatan Pelepasan Aset	2,380,000	166,282,886	(163,902,886)	(98.569)
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,600,000	3,600,000	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,600,000	3,600,000	0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5,980,000	169,882,886	(163,902,886)	(96.48)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(7,222,373,885)	(9,130,642,802)	1,908,268,917	(20.9)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(7,222,373,885)	(9,130,642,802)	1,908,268,917	(20.9)

Keterangan :

FINAL

JAKARTA, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HENDRI DARNADI
NIP 197007121991031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN BEA DAN CUKAI
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (668906) KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA

Tgl Data : 05/05/26 12:37 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 4:56 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	85,824,069,136	86,078,765,887	(254,696,751)	(0.3)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(7,222,373,885)	(9,130,642,802)	1,908,268,917	(20.9)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	6,852,324,504	8,875,946,051	(2,023,621,547)	(22.8)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(370,049,381)	(254,696,751)	(115,352,630)	45.29
EKUITAS AKHIR	85,454,019,755	85,824,069,136	(370,049,381)	(0.43)

Keterangan :

FINAL

JAKARTA, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HENDRI DARNADI
NIP 197007121991031001

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA UAKPB KANWIL DJBC JAKARTA PERIODE TAHUNAN (AUDITED) TAHUN ANGGARAN 2025

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat
18. Peraturan Menteri Keuangan nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan

- Pemerintah
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset eks Kepabeanaan dan Cukai
 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara
 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara
 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
 29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KM.06/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
 30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat
 31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan
 32. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud
 33. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Petunjuk Teknis Pencatatan Aset yang Berasal dari Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan
 34. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan
 35. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

B. Entitas Pelaporan

Kanwil DJBC Jakarta merupakan satuan kerja (satker) vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam struktur organisasi Pelaksana Penatausahaan Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan, Kanwil DJBC Jakarta berkedudukan sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) di bawah entitas pelaporan UAPPBW Kantor Wilayah DJBC Jakarta, UAPPBE1 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan UAPB Kementerian Keuangan. Catatan ini merupakan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) yang berada di bawah tanggung jawab Kanwil DJBC Jakarta sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang.

C. Periode Pelaporan

Periode Pelaporan yang akan diuraikan dalam Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) ini adalah Periode Tahunan (AUDITED) TA 2025, yaitu yang meliputi rentang waktu sepanjang 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D, dan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, bahwa setiap Unit Penatausahaan Pengguna Barang (UPPB) wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna (LBP) periode semesteran maupun tahunan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola barang, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Barang Kuasa Pengguna Kanwil DJBC Jakarta ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan penatausahaan BMN, antara lain:

1. Penggolongan/kodefikasi berdasarkan kebijakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 265/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar. Aset tetap dijabarkan dalam akun-akun yang disusun berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi, yaitu (a) Tanah, (b) Peralatan dan Mesin, (c) Gedung dan Bangunan, (d) Jalan dan Jembatan, (e) Irigasi, (f) Jaringan, (g) Aset Tetap dalam Renovasi, (h) Aset Tetap Lainnya, dan (i) Konstruksi Dalam Pengerjaan. Selain itu, dengan diterapkannya penyusutan maka ada tambahan akun Akumulasi Penyusutan pada seluruh Aset Tetap kecuali pada Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Sedangkan Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi sebagaimana disajikan dalam akun Akumulasi Amortisasi.
3. Terkait dengan kebijakan kapitalisasi atas aset tetap, Laporan Barang Pengguna Kementerian Keuangan ini telah disusun berdasarkan Lampiran VII pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
4. Adapun kebijakan rekonsiliasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
5. Kebijakan penyusutan BMN yang mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2013, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang

Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 94/KMK.06/2013 tentang Modul Penyusutan sebagaimana telah disesuaikan dengan KMK-145/KMK.06/2014 tentang Perubahan atas KMK-94/KMK.06/2014.

6. Kebijakan amortisasi BMN mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2016, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
7. Penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. Kebijakan penyajian BMN eks Kepabeanan dan Cukai yang dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan nomor Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset eks Kepabeanan dan Cukai.

Adapun kebijakan akuntansi yang signifikan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Barang Kanwil DJBC Jakarta adalah sebagai berikut:

A. Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat pada neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik (Stock Opname) pada tanggal neraca. Nilai dalam neraca disajikan dihitung berdasarkan:

1. Harga perolehan, apabila diperoleh dengan pembelian;
2. Harga pokok produksi, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3. Nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO, yakni barang yang masuk terlebih dahulu dianggap yang pertama kali keluar. Dengan metode ini, saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan persediaan terakhir.

B. Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap terdiri dari :

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan
5. Aset Tetap Lainnya.

Aset Tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan/pembuatan Aset Tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan masih dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dan siap digunakan. Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Aset tetap lainnya berupa Aset Tetap Renovasi (ATR) merupakan renovasi yang dilakukan oleh bukan pemilik aset. Terhadap ATR tersebut tidak dilakukan penyusutan apabila belanja untuk renovasi tidak menambah masa manfaat aset dan agar diserahkan kepada pemilik aset pada akhir periode akuntansi.

C. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya antara lain terdiri dari akun Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain mencakup aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud. Contoh dari aset lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Dengan kata lain, lingkup Aset Lain-lain dalam Laporan BMN hanya mencakup nilai BMN yang secara substansi diklasifikasikan sebagai Aset Lain-lain.

D. Kebijakan Penyusutan BMN

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah khususnya pada Lampiran I Paragraf 52 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Berbasis AkruaI Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, menetapkan bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan aset tetap merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Obyek Penyusutan aset tetap meliputi:

1. Gedung dan Bangunan;
2. Peralatan Mesin;
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
4. Aset Tetap Lainnya berupa aset tetap renovasi (selain tanah dalam renovasi) dan alat musik modern;
5. Aset Lainnya berupa Aset Tetap yang Dihentikan Dari Penggunaan Operasional Pemerintah yang masih memiliki karakteristik objek penyusutan; dan
6. Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga (selain tanah) dan Aset Idle yang masih memiliki karakteristik objek penyusutan.

Atas seluruh objek penyusutan tersebut dilakukan penyusutan baik untuk Intrakomptabel maupun Ekstrakomptabel. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

1. Tanah;
2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya;
4. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan; dan
5. Aset tetap renovasi yang tidak menambah masa manfaat.

1. Pelaksanaan Penyusutan

Penerapan penyusutan Aset Tetap dimulai pada pelaporan Semester I tahun 2013. Nilai yang disusutkan pertama kali, merupakan nilai buku per 31 Desember 2012 untuk BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk BMN yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2012, digunakan nilai perolehan atau nilai wajar yang merupakan nilai estimasi apabila nilai perolehannya tidak diketahui.

Dalam pelaksanaannya, proses penyusutan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. Penyusutan pertama kali

Merupakan proses penyusutan yang dilakukan pertama kali atas objek penyusutan yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2013. Nilai buku yang digunakan adalah nilai buku per 31 Desember 2012.

b. Penyusutan pada saat terjadinya transaksi BMN

Merupakan proses penyusutan yang dilakukan pada saat terjadinya transaksi BMN. Transaksi dimaksud merupakan transaksi BMN yang mempengaruhi/ mengoreksi ekuitas.

c. Penyusutan periodik

Merupakan proses penyusutan yang dilakukan secara periodik setiap semester dan dilakukan atas seluruh objek penyusutan. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat. Masa Manfaat Aset Tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

2. Perubahan Kebijakan Terkait Penyusutan

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat terdapat perubahan kebijakan terkait perhitungan penyusutan atas objek penyusutan yang diperoleh sebelum tahun 2005, yaitu untuk aset tetap yang diperoleh sebelum Tahun 2005, maka sebagai tindak lanjut dari hasil inventarisasi dan penilaian:

1. Penghitungan penyusutan dilakukan sejak Semester II Tahun 2010 sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap; dan
2. Pencatatan penyusutan dalam neraca dilakukan sejak semester II tahun 2010 sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan.

E. Amortisasi

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, aset yang digunakan oleh pemerintah, termasuk aset tak berwujud, mempunyai manfaat ekonomi atau potensi jasa terbatas yang perlu dilakukan amortisasi untuk penyesuaian nilai sehubungan dengan

penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dari suatu aset tak berwujud. Amortisasi aset tak berwujud merupakan alokasi harga perolehan aset tak berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya, yang hanya dapat diterapkan atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas. Penerapan amortisasi aset tak berwujud pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2016, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat. Agar peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 dimaksud dapat diimplementasikan, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 Tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud sebagaimana diubah terakhir melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022.

1. Objek Amortisasi Aset Tak Berwujud

Objek Amortisasi Aset Tak Berwujud meliputi:

1. Perangkat Lunak (Software) Komputer;
2. Lisensi;
3. Waralaba (Franchise);
4. Hak Cipta (Copyright); dan
5. Hak Paten.

Amortisasi aset tak berwujud tidak dilakukan terhadap:

1. Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta (Copyright) dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan penghapusannya;
2. Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan/atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan.

2. Pelaksanaan Amortisasi

Penerapan amortisasi aset tak berwujud dimulai pada pelaporan Semester I Tahun 2016. Nilai yang disusutkan pertama kali, merupakan nilai buku per 31 Desember 2015 untuk BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Untuk BMN yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2015, digunakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai taksiran yang merupakan nilai estimasi yang didasarkan pada perhitungan Pengguna Barang. Dalam pelaksanaannya, proses amortisasi dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. Amortisasi pertama kali

Merupakan proses Amortisasi yang dilakukan pertama kali atas objek penyusutan yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2016. Nilai buku yang digunakan adalah nilai buku per 31 Desember 2015.

b. Amortisasi pada saat terjadinya transaksi BMN

Merupakan proses amortisasi yang dilakukan pada saat terjadinya transaksi BMN.

Transaksi dimaksud merupakan transaksi BMN yang mempengaruhi/mengoreksi ekuitas.

c. Amortisasi periodik

Merupakan proses amortisasi yang dilakukan secara periodik setiap semester dan dilakukan atas seluruh objek penyusutan. Penghitungan dan pencatatan amortisasi aset tak berwujud dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat diamortisasi dari aset tak berwujud secara merata setiap semester selama masa manfaat. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah terakhir melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022.

F. Kebijakan Kapitalisasi BMN

1. BMN berupa gedung dan bangunan yang nilainya Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih;
2. BMN berupa peralatan dan mesin serta alat olahraga yang nilainya Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau lebih; dan
3. BMN berupa tanah, jalan, irigasi dan jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak kesenian yang nilainya Rp1,- (satu rupiah) atau lebih.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, BMN disajikan sebagai Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel. Intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi dan disajikan dalam Neraca Pemerintah Pusat, sedangkan Ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan tidak disajikan dalam neraca. Suatu BMN dinyatakan memenuhi syarat kapitalisasi apabila memenuhi batasan minimum jumlah biaya kapitalisasi (capitalization thresholds), dimana untuk sebelum TA 2018 yaitu:

Batas minimum kebijakan akuntansi mengalami perubahan sejak Semester 1 Tahun Anggaran 2018. Hal itu diamanatkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tersebut, yaitu:

1. BMN berupa gedung dan bangunan yang nilainya Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau lebih;
2. BMN berupa peralatan dan mesin serta alat olahraga yang nilainya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih; dan
3. BMN berupa koleksi perpustakaan, dan barang bercorak kesenian yang nilainya Rp1,- (satu rupiah) atau lebih.'

Batas nilai minimum tersebut tidak diperlukan untuk BMN berupa tanah, jalan, irigasi dan jaringan, KDP dan aset tetap lainnya.

Apabila terdapat biaya penambahan setelah perolehan awal suatu aset tetap, dapat dikapitalisasi pada nilai aset tetap jika:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat dan/atau kapasitas dan/atau kualitas dan/atau volume aset tetap yang telah dimiliki; dan
2. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Pencatatan transaksi untuk pengakuan aset tetap dicatat nilainya berdasarkan dokumen sumber seperti BAST. Perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi menggunakan belanja modal.

G. Pencatatan Aset Rusak Berat dan Hilang

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, atas aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan penghapusannya telah diusulkan kepada Pengelola Barang direklasifikasi ke dalam daftar barang hilang dan tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, LBP, Laporan Barang Milik Negara (LBMN), dan Neraca. Dalam hal keputusan penghapusan mengenai aset tetap yang hilang telah diterbitkan oleh Pengguna Barang, maka aset tersebut dihapus dari daftar barang hilang. Sementara itu, untuk aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dihapuskan, dilakukan reklasifikasi ke dalam daftar barang rusak berat, dan tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, LBP, LBMN, dan Neraca.

H. Akuntansi Berbasis Akrual

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Pusat harus menerapkan akuntansi berbasis akrual. Pasal 12 dan 13 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa pendapatan dan belanja dalam APBN dicatat menggunakan basis akrual. Penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan BMN Kementerian Keuangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dimulai tanggal 1 Januari 2015. Unsur laporan keuangan pemerintah berbasis akrual terdiri dari:

1. Laporan Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL;
2. Laporan Finansial, yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. Adapun Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
3. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Perubahan sistem pencatatan transaksi keuangan menjadi basis akrual juga akan berpengaruh dalam pelaporan BMN. Adapun pengaruh tersebut antara lain:

1. Jurnal dari Persediaan tidak hanya menyumbang nilai BMN di Neraca, tetapi juga berpengaruh pada beban-beban di Laporan Operasional (LO) terkait BMN seperti Beban Penyusutan dan Beban Persediaan serta akun-akun yang mempengaruhi LPE (Laporan Perubahan Ekuitas) seperti Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi, Penyesuaian Nilai Persediaan, Transfer Masuk, dan Transfer Keluar;
2. Perolehan BMN diakui pada saat hak kepemilikan BMN sudah berpindah tangan meski belum ada pembayaran yang dilakukan. Jadi saat penginputan BAST pada modul Komitmen di SAKTI, BMN sudah harus didetailkan dengan menjurnal Kewajiban kepada pihak ketiga;
3. Pembelian BMN membentuk jurnal kontrol yaitu dengan munculnya akun BMN Belum Diregister yang seharusnya bersaldo nol saat dilakukan pembayaran ketika belanja dan BMN yang diperoleh sudah tepat.

I. Pengelolaan BMN menggunakan Aplikasi SIMAN

Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan BMN dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset

Negara, pengelolaan BMN dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SIMAN. Data BMN pada SIMAN menggunakan basis data tunggal (single database), sehingga terdokumentasi dan dapat ditelusuri.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Kuasa Pengguna Barang Kanwil DJBC Jakarta Periode Tahunan (AUDITED) TA 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Kanwil DJBC Jakarta.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) bruto yang disajikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan 2025 AUDITED adalah sebesar Rp110.240.258.525 (110,24 miliar rupiah) yang merupakan nilai BMN berupa Saldo Awal sebesar Rp109.936.305.675 (109,93 miliar rupiah) dan nilai mutasi nett yang terjadi selama Periode Tahunan 2025 AUDITED sebesar Rp303.952.850 (303,95 juta rupiah). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan dan transaksi yang terkait dengan siklus pengelolaan BMN.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Sistem Aplikasi yang digunakan untuk Unit Akuntansi Tingkat Kuasa Pengguna Barang, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Tingkat Wilayah, dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Tingkat Eselon I adalah aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap dan Modul Persediaan. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Laporan Posisi BMN di Neraca per 31 Desember 2025;
2. Laporan Posisi BMN di Neraca Saldo Awal;
3. Laporan Barang Persediaan;
4. Laporan Barang Intrakomptabel;
5. Laporan Barang Ekstrakomptabel;
6. Laporan Barang Gabungan;
7. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
8. Laporan Aset Tak Berwujud;
9. Laporan Barang Bersejarah;
10. Laporan Barang Rusak Berat;
11. Laporan Barang Hilang;
12. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
13. Laporan Barang Hibah Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
14. Laporan Penyusutan Intrakomptabel;
15. Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel;
16. Laporan Penyusutan Gabungan;
17. Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud;
18. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
19. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Data BMN UAPB-E1 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
20. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN;
21. Data Transfer Masuk dan Transfer Keluar BMN pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
22. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA

A. Saldo Awal per 1 Januari 2025

Nilai keseluruhan BMN per 1 Januari 2025 pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Kanwil DJBC Jakarta adalah sebesar Rp109.936.305.675 (109,93 miliar rupiah), yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp109.908.548.225 (109,90 miliar rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp27.757.450 (27,76 juta rupiah).

B. Mutasi sepanjang 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025

1. Persediaan (117XXX)

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 pada Laporan Kuasa Pengguna Barang adalah sebesar Rp84.280.569 (84,28 juta rupiah) [\downarrow 55,82%]. Jumlah tersebut terdiri dari Saldo Awal Persediaan dengan nilai sebesar Rp190.784.664 (190,78 juta rupiah), Mutasi Tambah Persediaan dengan nilai sebesar Rp188.723.951 (188,72 juta rupiah) [\uparrow 98,92%], serta Mutasi Kurang Persediaan dengan nilai sebesar Rp295.228.046 (295,23 juta rupiah) [\downarrow 154,74%]

a. Barang Konsumsi (117111)

Saldo Barang Konsumsi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp58.860.479 (58,86 juta rupiah) [\downarrow 58,80%]. Jumlah tersebut terdiri dari Saldo Awal Barang Konsumsi dengan nilai sebesar Rp142.863.422 (142,86 juta rupiah), Mutasi Tambah Barang Konsumsi dengan nilai sebesar Rp147.338.751 (147,34 juta rupiah) [\uparrow 103,13%], serta Mutasi Kurang Barang Konsumsi dengan nilai sebesar Rp231.341.694 (231,34 juta rupiah) [\downarrow 161,93%]

Sebagian Barang Konsumsi diadakan secara terpusat sebelum didistribusikan ke satuan kerja di bawahnya, yaitu: Perlengkapan Dinas.

Mutasi Tambah Barang Konsumsi dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian Transaksi	Kuantitas	Nilai
Pembelian Alat Listrik	42	2.719.500
Pembelian Alat Tulis Kantor	1.132	11.448.651
Pembelian Bahan Komputer	59	27.236.625
Pembelian Kertas Dan Cover	906	24.267.375
Pembelian Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor	450	4.500.000
Pembelian Segel oleh satker daerah	40	1.656.120
Transfer Masuk Online Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya [Kantor Pusat DJBC]	2	5.218.500
Transfer Masuk Online PLD oleh satker daerah [Kantor Pusat DJBC]	2.388	70.291.980

Mutasi Kurang Barang Konsumsi dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian Transaksi	Kuantitas	Nilai
Habis Pakai Alat Listrik	-103	-2.963.743
Habis Pakai Alat Tulis Kantor	-2.176	-24.934.034
Habis Pakai Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-25	-16.988.780
Habis Pakai Bahan Komputer	-303	-74.487.810
Habis Pakai Kertas Dan Cover	-1.346	-31.929.047
Habis Pakai Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor	-500	-5.000.000
Habis Pakai PLD oleh satker daerah	-2.420	-72.354.030
Habis Pakai Segel oleh satker daerah	-54	-2.684.250

Saldo Akhir Barang Konsumsi tersebut dapat dirinci berdasarkan sub-kelompok dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	%
Alat Tulis Kantor	11.480.062		19,50%
Kertas Dan Cover	3.220.158		5,47%
Bahan Cetak	462.000		0,78%
Bahan Komputer	31.207.665		53,02%
Alat Listrik	2.896.820		4,92%
Perlengkapan Dinas	308.374		0,52%
Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor	900.000		1,53%
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.385.400		14,25%

b. Amunisi (117112)

Aset berupa Amunisi pada Kuasa Pengguna Barang Kanwil DJBC Jakarta digunakan dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan dan penindakan, juga digunakan dalam rangka kegiatan latihan menembak. Seluruh Amunisi diadakan secara terpusat di Kantor Pusat untuk kemudian didistribusikan ke satuan kerja di daerah.

Saldo Amunisi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.450.255 (8,45 juta rupiah) [\downarrow 38,63%]. Jumlah tersebut terdiri dari Saldo Awal Amunisi dengan nilai sebesar Rp13.770.455 (13,77 juta rupiah), Mutasi Tambah Amunisi dengan nilai sebesar Rp9.417.100 (9,42 juta rupiah) [\uparrow 68,39%], serta Mutasi Kurang Amunisi dengan nilai sebesar Rp14.737.300 (14,74 juta rupiah) [\downarrow 107,02%]

Mutasi Tambah Amunisi dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian Transaksi	Kuantitas	Nilai
Transfer Masuk Online Bahan Peledak	700	9.417.100

Uraian Transaksi	Kuantitas	Nilai
[Kantor Pusat DJBC]		

Mutasi Kurang Amunisi dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian Transaksi	Kuantitas	Nilai
Habis Pakai Bahan Peledak [Sesuai]	-1.100	-14.737.300

Saldo Akhir Amunisi tersebut dapat dirinci berdasarkan sub-kelompok dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	%
Bahan Peledak	8.450.255		100,00%

c. Bahan untuk Pemeliharaan (117113)

Saldo Bahan untuk Pemeliharaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp16.969.835 (16,97 juta rupiah) [\downarrow 50,31%]. Jumlah tersebut terdiri dari Saldo Awal Bahan untuk Pemeliharaan dengan nilai sebesar Rp34.150.787 (34,15 juta rupiah), Mutasi Tambah Bahan untuk Pemeliharaan dengan nilai sebesar Rp18.081.900 (18,08 juta rupiah) [\uparrow 52,95%], serta Mutasi Kurang Bahan untuk Pemeliharaan dengan nilai sebesar Rp35.262.852 (35,26 juta rupiah) [\downarrow 103,26%]

Mutasi Tambah Bahan untuk Pemeliharaan dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian Transaksi	Kuantitas	Nilai
Pembelian Perabot Kantor	745	18.081.900

Mutasi Kurang Bahan untuk Pemeliharaan dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian Transaksi	Kuantitas	Nilai
Habis Pakai Perabot Kantor	-1.477	-35.262.852

Saldo Akhir Bahan untuk Pemeliharaan tersebut dapat dirinci berdasarkan sub-kelompok dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	%
Perabot Kantor	16.969.835		100,00%

Mutasi Tambah Persediaan Lainnya dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian Transaksi	Kuantitas	Nilai
Pembelian Obat	287	13.886.200

Mutasi Kurang Persediaan Lainnya dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian Transaksi	Kuantitas	Nilai
Habis Pakai Obat	-287	-13.886.200

2. Tanah (131XXX)

Saldo Tanah per 31 Desember 2025 pada Laporan Kuasa Pengguna Barang adalah sebesar Rp56.628.375.000 (56,63 miliar rupiah) [$\uparrow 0,00\%$]. Jumlah tersebut terdiri dari Saldo Awal Tanah dengan nilai sebesar Rp56.628.375.000 (56,63 miliar rupiah), tidak terdapat Mutasi Tambah Tanah, serta tidak terdapat Mutasi Kurang Tanah

a. Tanah (201XXXXXXX)

Aset Tanah pada Daftar Barang Kanwil DJBC Jakarta terdiri dari subkelompok: Tanah Bangunan Kantor Pemerintah.

Saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp56.628.375.000 (56,63 miliar rupiah) [$\uparrow 0,00\%$]. Jumlah tersebut terdiri dari Saldo Awal Tanah dengan nilai sebesar Rp56.628.375.000 (56,63 miliar rupiah), tidak terdapat Mutasi Tambah Tanah, serta tidak terdapat Mutasi Kurang Tanah

Saldo Akhir Tanah tersebut dapat dirinci berdasarkan sub-kelompok dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	%
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	56.628.375.000		100,00%

Akumulasi penyusutan berdasarkan sub-kelompok dari bidang barang Tanah dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	% Penyusutan
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	56.628.375.000	0	susut 0,00%

Tidak ada aset Tanah yang Dihentikan Penggunaannya.

Tidak ada aset Tanah yang Diusulkan Penghapusannya.

Saldo Tanah di atas (selain dari yang dihentikan dan diusulkan penghapusan) berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai Perolehan
Baik	1.973 m2	56.628.375.000
Rusak Ringan	0 m2	0
Rusak Berat	0 m2	0
Tanpa Keterangan	0 m2	0

Berdasarkan data aplikasi pengelolaan aset, status sertifikasi BMN berupa Tanah yang masih tercatat sebagai Aset Tetap aktif dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna Kanwil DJBC Jakarta yaitu 1 NUP Bersertipikat Seluruh Bidang. Rekapitulasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian Barang	NUP	Luas (m2)	Nilai Perolehan	Status Sertifikasi	Jenis Sertipikat/Dokumen
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1.973	56.628.375.000	Bersertipikat Seluruh Bidang	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/Lembaga

3. Peralatan dan Mesin (132XXX)

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 pada Laporan Kuasa Pengguna Barang adalah sebesar Rp17.934.462.897 (17,93 miliar rupiah) [↓8,19%]. Jumlah tersebut terdiri dari Saldo Awal Peralatan dan Mesin dengan nilai sebesar Rp18.701.646.447 (18,70 miliar rupiah), Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin dengan nilai sebesar Rp1.055.056.200 (1,05 miliar rupiah) [↑0,21%], serta Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin dengan nilai sebesar Rp1,822,239,750 (1,82 miliar rupiah) [↓9,74%]

a. Alat Besar (301XXXXXXX)

Aset Alat Besar pada Daftar Barang Kanwil DJBC Jakarta terdiri dari subkelompok: Elevator /Lift, Stationary Generating Set, Elevator (Feeder), Water Treatment (Mesin Proses), Stationary Water Pump, dll.

Saldo Alat Besar per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.394.686.036 (3,39 miliar rupiah) [↑0,00%]. Jumlah tersebut terdiri dari Saldo Awal Alat Besar dengan nilai sebesar Rp3.394.686.036 (3,39 miliar rupiah), tidak terdapat Mutasi Tambah Alat Besar, serta tidak terdapat Mutasi Kurang Alat Besar

Saldo Akhir Alat Besar tersebut dapat dirinci berdasarkan sub-kelompok dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	%
Mesin Proses	156.400.000		4,61%
Feeder	1.773.885.840		52,25%
Electric Generating Set	1.331.066.696		39,21%
Pompa	133.333.500		3,93%

Akumulasi penyusutan berdasarkan sub-kelompok dari bidang barang Alat Besar dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	% Penyusutan
Mesin Proses	156.400.000	-156.400.000	susut 100,00%
Feeder	1.773.885.840	-1.773.885.840	susut 100,00%
Electric Generating Set	1.331.066.696	-1.331.066.696	susut 100,00%
Pompa	133.333.500	-133.333.500	susut 100,00%

Tidak ada aset Alat Besar yang Dihentikan Penggunaannya.

Tidak ada aset Alat Besar yang Diusulkan Penghapusannya.

Saldo Alat Besar di atas (selain dari yang dihentikan dan diusulkan penghapusan)

berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai Perolehan
Baik	18 unit	3.394.686.036
Rusak Ringan	0 unit	0
Rusak Berat	0 unit	0
Tanpa Keterangan	0 unit	0

b. Alat Angkutan (302XXXXXXX)

Aset Alat Angkutan pada Daftar Barang Kanwil DJBC Jakarta terdiri dari subkelompok: Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang), Jeep, Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah), Pick Up, Sepeda Motor, Sepeda Motor Patroli. Tata penggunaan/pemilihan sebagian kode barang dari Bidang Alat Angkutan di lingkungan DJBC diatur dalam SE-07/BC/2024 (Alat Angkutan Darat Bermotor) dan SE-04/BC/2025 (Alat Angkutan Apung Bermotor).

Saldo Alat Angkutan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.083.437.962 (3,08 miliar rupiah) [↓23,49%]. Jumlah tersebut terdiri dari Saldo Awal Alat Angkutan dengan nilai sebesar Rp3.029.091.912 (3,03 miliar rupiah), Mutasi Tambah Alat Angkutan dengan nilai sebesar Rp805.449.400 (805,45 juta rupiah) [↑1,30%], serta Mutasi Kurang Alat Angkutan dengan nilai sebesar Rp751.103.350 (751,1 juta rupiah) [↓24,80%]

Mutasi Tambah Alat Angkutan dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Penyelesaian Pembangunan Sepeda Motor Patroli melalui KDP [Sesuai]	39.449.400	

Mutasi Kurang Alat Angkutan dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Penghentiaan Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) dari Penggunaan	-724.499.850	
Penghentiaan Sepeda Motor dari Penggunaan	-26.603.500	

Saldo Akhir Alat Angkutan tersebut dapat dirinci berdasarkan sub-kelompok dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	%
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	897.895.000		29,12%
Kendaraan Bermotor Penumpang	1.770.030.282		57,40%
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	318.733.000		10,34%
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	96.779.680		3,14%

Akumulasi penyusutan berdasarkan sub-kelompok dari bidang barang Alat Angkutan dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	% Penyusutan
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	897.895.000	-505.752.144	susut 56,33%
Kendaraan Bermotor Penumpang	1.770.030.282	-1.058.744.568	susut 59,82%
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	318.733.000	-318.733.000	susut 100,00%
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	96.779.680	-60.148.094	susut 62,15%

Tidak ada aset Alat Angkutan yang Dihentikan Penggunaannya.

Tidak ada aset Alat Angkutan yang Diusulkan Penghapusannya.

Saldo Alat Angkutan di atas (selain dari yang dihentikan dan diusulkan penghapusan) berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai Perolehan
Baik	13 unit	3.083.437.962
Rusak Ringan	0 unit	0
Rusak Berat	0 unit	0
Tanpa Keterangan	0 unit	0

Saldo tersebut di atas tidak termasuk Alat Bengkel dan Alat Ukur yang telah Dihentikan Penggunaannya sebanyak 1 dengan nilai sebesar Rp20.805.400.

Tidak ada aset Alat Bengkel dan Alat Ukur yang Diusulkan Penghapusannya.

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas (selain dari yang dihentikan dan diusulkan penghapusan) berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai Perolehan
Baik	0 unit	0
Rusak Ringan	0 unit	0
Rusak Berat	0 unit	0
Tanpa Keterangan	0 unit	0

c. Alat Kantor dan Rumah Tangga (305XXXXXXX)

Aset Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Daftar Barang Kanwil DJBC Jakarta terdiri dari subkelompok: Alat Kantor Lainnya, Alat Pendingin, Meubelair, Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor, Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), Alat Dapur, Alat Pembersih, Alat Kantor Lainnya. Tata penggunaan/pemilihan sebagian kode barang dari Bidang Alat Kantor dan Rumah Tangga di lingkungan DJBC diatur dalam SE-04/BC/2025 (Alat Kantor).

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.541.599.825 (6,54 miliar rupiah) [↓0,80%]. Jumlah tersebut terdiri dari Saldo Awal Alat Kantor dan Rumah Tangga dengan nilai sebesar Rp6.594.409.181 (6,59 miliar rupiah), tidak terdapat Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga, serta Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga dengan nilai sebesar Rp52.809.356 (52,81 juta rupiah) [↓0,80%]

Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Penghentiaan Alat Kantor Lainnya dari Penggunaan	-5.273.400	
Penghentiaan Alat Pemotong Kertas dari Penggunaan	-2.200.000	
Penghentiaan Alat Penghancur Kertas dari Penggunaan	-4.000.000	
Penghentiaan Filing Cabinet Besi dari Penggunaan	-5.940.000	
Penghentiaan Kursi Besi/Metal dari Penggunaan	-26.897.356	
Penghentiaan Lemari Besi/Metal dari Penggunaan	-5.748.600	
Penghentiaan Mesin Laminating dari Penggunaan	-2.750.000	

Saldo Akhir Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut dapat dirinci berdasarkan sub-kelompok dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	%
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	861.688.578		13,17%
Alat Kantor Lainnya	1.870.316.935		28,59%
Alat Kantor Lainnya	0		0,00%
Meubelair	1.545.404.869		23,62%
Alat Pembersih	10.771.200		0,16%
Alat Pendingin	1.746.190.945		26,69%
Alat Dapur	32.355.000		0,49%
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	466.318.698	8.553.600	7,26%

Akumulasi penyusutan berdasarkan sub-kelompok dari bidang barang Alat Kantor dan Rumah Tangga dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	% Penyusutan
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	861.688.578	-834.688.578	susut 96,87%
Alat Kantor Lainnya	1.870.316.935	-1.857.516.935	susut 99,32%
Alat Kantor Lainnya	0	0	susut 0,00%
Meubelair	1.545.404.869	-1.545.404.869	susut 100,00%
Alat Pembersih	10.771.200	-10.771.200	susut 100,00%
Alat Pendingin	1.746.190.945	-1.746.190.945	susut 100,00%

Uraian Subkelompok	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	% Penyusutan
Alat Dapur	32.355.000	-32.355.000	susut 100,00%
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	474.872.298	-474.872.298	susut 100,00%

Saldo tersebut di atas tidak termasuk Alat Kantor dan Rumah Tangga yang telah Dihentikan Penggunaannya sebanyak 81 dengan nilai sebesar Rp133.195.856.

Tidak ada aset Alat Kantor dan Rumah Tangga yang Diusulkan Penghapusannya.

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas (selain dari yang dihentikan dan diusulkan penghapusan) berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai Perolehan
Baik	1.658 buah	6.478.957.485
Rusak Ringan	48 buah	62.642.340
Rusak Berat	0 buah	0
Tanpa Keterangan	0 buah	0

d. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (306XXXXXX)

Aset Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Daftar Barang Kanwil DJBC Jakarta terdiri dari subkelompok: Peralatan Pemancar Dan Penerima Uhf, Alat Komunikasi Telephone, Alat-Alat Sandi, Peralatan Studio Audio, Peralatan Studio Video Dan Film, Alat Komunikasi Satelit, Peralatan Cetak, Alat Komunikasi Radio Hf/Fm.

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.025.720.198 (1,03 miliar rupiah) [$\uparrow 0,00\%$]. Jumlah tersebut terdiri dari Saldo Awal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar dengan nilai sebesar Rp1.025.720.198 (1,03 miliar rupiah), tidak terdapat Mutasi Tambah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, serta tidak terdapat Mutasi Kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Saldo Akhir Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut dapat dirinci berdasarkan sub-kelompok dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	%
Peralatan Studio Audio	313.285.900		30,54%
Peralatan Studio Video Dan Film	194.186.196		18,93%
Peralatan Cetak	4.400.000		0,43%
Alat Komunikasi Telephone	262.236.852		25,57%
Alat Komunikasi Radio Hf/Fm		416.250	0,04%
Alat-Alat Sandi	227.270.000		22,16%
Alat Komunikasi Satelit	22.000.000		2,14%
Peralatan Pemancar Dan Penerima Uhf	1.925.000		0,19%

Akumulasi penyusutan berdasarkan sub-kelompok dari bidang barang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	% Penyusutan
Peralatan Studio Audio	313.285.900	-197.215.900	susut 62,95%
Peralatan Studio Video Dan Film	194.186.196	-182.330.196	susut 93,89%
Peralatan Cetak	4.400.000	-4.400.000	susut 100,00%
Alat Komunikasi Telephone	262.236.852	-262.236.852	susut 100,00%
Alat Komunikasi Radio Hf/Fm	416.250	-291.375	susut 70,00%
Alat-Alat Sandi	227.270.000	-68.181.000	susut 30,00%
Alat Komunikasi Satelit	22.000.000	-8.800.000	susut 40,00%
Peralatan Pemancar Dan Penerima Uhf	1.925.000	-1.925.000	susut 100,00%

Saldo tersebut di atas tidak termasuk Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang telah Dihentikan Penggunaannya sebanyak 1 dengan nilai sebesar Rp366.870.763.

Tidak ada aset Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang Diusulkan Penghapusannya.

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas (selain dari yang dihentikan dan diusulkan penghapusan) berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai Perolehan
Baik	88 buah	985.824.548
Rusak Ringan	5 buah	39.895.650
Rusak Berat	0 buah	0
Tanpa Keterangan	0 buah	0

e. Alat Kedokteran dan Kesehatan (307XXXXXX)

Aset Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Daftar Barang Kanwil DJBC Jakarta terdiri dari subkelompok: Cabinet AC & DC Defibrilator Cardioc And Recorder Seward, Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum), Operating Lamp.

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.421.600 (9,42 juta rupiah) [\uparrow 0,00%]. Jumlah tersebut terdiri dari Saldo Awal Alat Kedokteran dan Kesehatan dengan nilai sebesar Rp9.421.600 (9,42 juta rupiah), tidak terdapat Mutasi Tambah Alat Kedokteran dan Kesehatan, serta tidak terdapat Mutasi Kurang Alat Kedokteran dan Kesehatan

Saldo Akhir Alat Kedokteran dan Kesehatan tersebut dapat dirinci berdasarkan sub-kelompok dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	%
Alat Kedokteran Umum	2.090.000	831.600	31,01%
Alat Kedokteran Jantung	6.500.000		68,99%

Akumulasi penyusutan berdasarkan sub-kelompok dari bidang barang Alat Kedokteran dan Kesehatan dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	% Penyusutan
Alat Kedokteran Umum	2.921.600	-2.921.600	susut 100,00%
Alat Kedokteran Jantung	6.500.000	-6.500.000	susut 100,00%

Tidak ada aset Alat Kedokteran dan Kesehatan yang Dihentikan Penggunaannya.
 Tidak ada aset Alat Kedokteran dan Kesehatan yang Diusulkan Penghapusannya.
 Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas (selain dari yang dihentikan dan diusulkan penghapusan) berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai Perolehan
Baik	11 buah	9.421.600
Rusak Ringan	0 buah	0
Rusak Berat	0 buah	0
Tanpa Keterangan	0 buah	0

f. Alat Laboratorium (308XXXXXX)

Aset Alat Laboratorium pada Daftar Barang Kanwil DJBC Jakarta terdiri dari subkelompok: Pompa Hidrolik.

Saldo Alat Laboratorium per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp17.400.000 (17,4 juta rupiah) [$\uparrow 0,00\%$]. Jumlah tersebut terdiri dari Saldo Awal Alat Laboratorium dengan nilai sebesar Rp17.400.000 (17,4 juta rupiah), tidak terdapat Mutasi Tambah Alat Laboratorium, serta tidak terdapat Mutasi Kurang Alat Laboratorium

Saldo Akhir Alat Laboratorium tersebut dapat dirinci berdasarkan sub-kelompok dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	%
Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	17.400.000		100,00%

Akumulasi penyusutan berdasarkan sub-kelompok dari bidang barang Alat Laboratorium dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	% Penyusutan
Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	17.400.000	-17.400.000	susut 100,00%

Tidak ada aset Alat Laboratorium yang Dihentikan Penggunaannya.
 Tidak ada aset Alat Laboratorium yang Diusulkan Penghapusannya.
 Saldo Alat Laboratorium di atas (selain dari yang dihentikan dan diusulkan penghapusan) berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai Perolehan
Baik	2 buah	17.400.000
Rusak Ringan	0 buah	0
Rusak Berat	0 buah	0

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai Perolehan
Tanpa Keterangan	0 buah	0

g. Alat Persenjataan (309XXXXXX)

Aset Alat Persenjataan pada Daftar Barang Kanwil DJBC Jakarta terdiri dari subkelompok: Ion Scan, Pistol, Senapan Semi Otomatis, Collapsible Water Tank, Digital Camera. Sebagian Alat Persenjataan diadakan secara terpusat sebelum didistribusikan ke satuan kerja di bawahnya, yaitu: Pistol, Senapan Semi Otomatis. Tata penggunaan/pemilihan sebagian kode barang dari Bidang Alat Persenjataan di lingkungan DJBC diatur dalam SE-04/BC/2025 (Persenjataan Non Senjata Api).

Saldo Alat Persenjataan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.413.077.400 (1,41 miliar rupiah) [$\uparrow 0,00\%$]. Jumlah tersebut terdiri dari Saldo Awal Alat Persenjataan dengan nilai sebesar Rp1.413.077.400 (1,41 miliar rupiah), tidak terdapat Mutasi Tambah Alat Persenjataan, serta tidak terdapat Mutasi Kurang Alat Persenjataan

Saldo Akhir Alat Persenjataan tersebut dapat dirinci berdasarkan sub-kelompok dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	%
Senjata Genggam	117.810.000		8,34%
Senjata Bahu/ Senjata Laras Panjang	64.460.000		4,56%
Alat Nuklir, Biologi Dan Kimia	42.000.000		2,97%
Peralatan Deteksi Intel	14.890.000		1,05%
Instrumen Analisis Lab Forensik	1.173.917.400		83,08%

Akumulasi penyusutan berdasarkan sub-kelompok dari bidang barang Alat Persenjataan dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	% Penyusutan
Senjata Genggam	117.810.000	-117.810.000	susut 100,00%
Senjata Bahu/ Senjata Laras Panjang	64.460.000	-64.460.000	susut 100,00%
Alat Nuklir, Biologi Dan Kimia	42.000.000	-42.000.000	susut 100,00%
Peralatan Deteksi Intel	14.890.000	-11.167.500	susut 75,00%
Instrumen Analisis Lab Forensik	1.173.917.400	-1.173.917.400	susut 100,00%

Tidak ada aset Alat Persenjataan yang Dihentikan Penggunaannya.

Tidak ada aset Alat Persenjataan yang Diusulkan Penghapusannya.

Saldo Alat Persenjataan di atas (selain dari yang dihentikan dan diusulkan penghapusan) berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai Perolehan
Baik	31 buah	1.413.077.400

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai Perolehan
Rusak Ringan	0 buah	0
Rusak Berat	0 buah	0
Tanpa Keterangan	0 buah	0

h. Alat Komputer/TIK (310XXXXXX)

Aset Alat Komputer/TIK pada Daftar Barang Kanwil DJBC Jakarta terdiri dari subkelompok: Personal Komputer, Peralatan Jaringan, Peralatan Personal Komputer, Komputer Jaringan. Tata penggunaan/pemilihan sebagian kode barang dari Bidang Alat Komputer/TIK di lingkungan DJBC diatur dalam SE-07/BC/2024 (Komputer Unit).

Saldo Alat Komputer/TIK per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.231.949.376 (2,23 miliar rupiah) [↓25,62%]. Jumlah tersebut terdiri dari Saldo Awal Alat Komputer/TIK dengan nilai sebesar Rp3.000.669.620 (3 miliar rupiah), tidak terdapat Mutasi Tambah Alat Komputer/TIK, serta Mutasi Kurang Alat Komputer/TIK dengan nilai sebesar Rp1.018.327.044 (1,02 miliar rupiah) [↓33,94%]

Mutasi Kurang Alat Komputer/TIK dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Penghentiaan CPU (Peralatan Personal Komputer) dari Penggunaan	-40.352.400	
Penghentiaan Lap Top dari Penggunaan	-246.904.644	
Penghentiaan P.C Unit dari Penggunaan	-680.720.000	
Penghentiaan Printer (Peralatan Personal Komputer) dari Penggunaan	-44.100.000	
Penghentiaan Scanner (Peralatan Personal Komputer) dari Penggunaan	-6.250.000	

Saldo Akhir Alat Komputer/TIK tersebut dapat dirinci berdasarkan sub-kelompok dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	%
Komputer Jaringan	59.700.000		2,67%
Personal Komputer	1.609.105.800		72,09%
Peralatan Personal Komputer	169.995.800		7,62%
Peralatan Jaringan	393.147.776		17,61%

Akumulasi penyusutan berdasarkan sub-kelompok dari bidang barang Alat Komputer/TIK dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	% Penyusutan
Komputer Jaringan	59.700.000	-59.700.000	susut 100,00%
Personal Komputer	1.609.105.800	-1.249.283.150	susut 77,64%

Uraian Subkelompok	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	% Penyusutan
Peralatan Personal Komputer	169.995.800	-169.995.800	susut 100,00%
Peralatan Jaringan	393.147.776	-365.397.776	susut 92,94%

Saldo tersebut di atas tidak termasuk Alat Komputer/TIK yang telah Dihentikan Penggunaannya sebanyak 109 dengan nilai sebesar Rp1.018.327.044.

Tidak ada aset Alat Komputer/TIK yang Diusulkan Penghapusannya.

Saldo Alat Komputer/TIK di atas (selain dari yang dihentikan dan diusulkan penghapusan) berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai Perolehan
Baik	164 unit	1.767.247.376
Rusak Ringan	38 unit	464.702.000
Rusak Berat	0 unit	0
Tanpa Keterangan	0 unit	0

i. Alat Keselamatan Kerja (315XXXXXXX)

Aset Alat Keselamatan Kerja pada Daftar Barang Kanwil DJBC Jakarta terdiri dari subkelompok: Baju Pengaman Lainnya, Tandu.

Saldo Alat Keselamatan Kerja per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp213.843.450 (213,84 juta rupiah) [$\uparrow 0,00\%$]. Jumlah tersebut terdiri dari Saldo Awal Alat Keselamatan Kerja dengan nilai sebesar Rp213.843.450 (213,84 juta rupiah), tidak terdapat Mutasi Tambah Alat Keselamatan Kerja, serta tidak terdapat Mutasi Kurang Alat Keselamatan Kerja

Saldo Akhir Alat Keselamatan Kerja tersebut dapat dirinci berdasarkan sub-kelompok dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	%
Baju Pengaman	211.140.450		98,74%
Alat Penolong	2.703.000		1,26%

Akumulasi penyusutan berdasarkan sub-kelompok dari bidang barang Alat Keselamatan Kerja dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	% Penyusutan
Baju Pengaman	211.140.450	-84.456.180	susut 40,00%
Alat Penolong	2.703.000	-2.703.000	susut 100,00%

Tidak ada aset Alat Keselamatan Kerja yang Dihentikan Penggunaannya.

Tidak ada aset Alat Keselamatan Kerja yang Diusulkan Penghapusannya.

Saldo Alat Keselamatan Kerja di atas (selain dari yang dihentikan dan diusulkan penghapusan) berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai Perolehan
Baik	3 buah	213.843.450

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai Perolehan
Rusak Ringan	0 buah	0
Rusak Berat	0 buah	0
Tanpa Keterangan	0 buah	0

j. Peralatan Proses/Produksi (317XXXXXXX)

Pencatatan aset dalam bidang barang Peralatan Proses/Produksi seharusnya tidak terjadi karena tidak terkait dengan tugas dan fungsi DJBC. Klasifikasi barang ke Peralatan Proses/Produksi pada Laporan Barang Kanwil DJBC Jakarta disebabkan faktor kesalahan pemilihan kode barang oleh operator yang bertugas memilih kode barang dalam rangka Pengadaan/Perolehan barang. Kesalahan tersebut dikoreksi dengan tindak lanjut reklasifikasi kode barang. Namun kode barang dalam bidang ini dapat digunakan dengan syarat apabila belum ada alternatif kode barang dalam bidang/kelompok barang lainnya yang sesuai dengan fungsi barang. Aset Peralatan Proses/Produksi pada Daftar Barang Kanwil DJBC Jakarta terdiri dari subkelompok: Jet Pump.

Saldo Peralatan Proses/Produksi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.233.500 (8,23 juta rupiah) [$\uparrow 0,00\%$]. Jumlah tersebut terdiri dari Saldo Awal Peralatan Proses/Produksi dengan nilai sebesar Rp8.233.500 (8,23 juta rupiah), tidak terdapat Mutasi Tambah Peralatan Proses/Produksi, serta tidak terdapat Mutasi Kurang Peralatan Proses/Produksi

Saldo Akhir Peralatan Proses/Produksi tersebut dapat dirinci berdasarkan sub-kelompok dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	%
Transport And Storage Equipment For Liquid	8.233.500		100,00%

Akumulasi penyusutan berdasarkan sub-kelompok dari bidang barang Peralatan Proses/Produksi dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	% Penyusutan
Transport And Storage Equipment For Liquid	8.233.500	-7.718.907	susut 93,75%

Tidak ada aset Peralatan Proses/Produksi yang Dihentikan Penggunaannya.

Tidak ada aset Peralatan Proses/Produksi yang Diusulkan Penghapusannya.

Saldo Peralatan Proses/Produksi di atas (selain dari yang dihentikan dan diusulkan penghapusan) berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai Perolehan
Baik	1 buah	8.233.500
Rusak Ringan	0 buah	0
Rusak Berat	0 buah	0
Tanpa Keterangan	0 buah	0

k. Peralatan Olah Raga (319XXXXXXX)

Aset berupa Peralatan Olah Raga pada Kuasa Pengguna Barang Kanwil DJBC Jakarta digunakan dalam rangka dalam rangka menunjang kesehatan dan kebugaran pegawai selaku aparatur negara. Aset Peralatan Olah Raga pada Daftar Barang Kanwil DJBC Jakarta terdiri dari subkelompok: Sepeda Olah Raga.

Saldo Peralatan Olah Raga per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.895.000 (4,9 juta rupiah) [$\uparrow 0,00\%$]. Jumlah tersebut terdiri dari Saldo Awal Peralatan Olah Raga dengan nilai sebesar Rp4.895.000 (4,9 juta rupiah), tidak terdapat Mutasi Tambah Peralatan Olah Raga, serta tidak terdapat Mutasi Kurang Peralatan Olah Raga

Saldo Akhir Peralatan Olah Raga tersebut dapat dirinci berdasarkan sub-kelompok dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	%
Peralatan Olah Raga Lainnya	4.895.000		100,00%

Akumulasi penyusutan berdasarkan sub-kelompok dari bidang barang Peralatan Olah Raga dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	% Penyusutan
Peralatan Olah Raga Lainnya	4.895.000	-4.895.000	susut 100,00%

Tidak ada aset Peralatan Olah Raga yang Dihentikan Penggunaannya.

Tidak ada aset Peralatan Olah Raga yang Diusulkan Penghapusannya.

Saldo Peralatan Olah Raga di atas (selain dari yang dihentikan dan diusulkan penghapusan) berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai Perolehan
Baik	1 buah	4.895.000
Rusak Ringan	0 buah	0
Rusak Berat	0 buah	0
Tanpa Keterangan	0 buah	0

I. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp15.945.570.303 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Nilai Perolehan	Susut Intrakomptabel	Susut Ekstrakomptabel	%
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	17.944.264.347	-15.935.893.728	-9.676.575	88,86%

4. Gedung dan Bangunan (133XXX)

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 pada Laporan Kuasa Pengguna Barang adalah sebesar Rp34.128.420.115 (34,13 miliar rupiah) [$\uparrow 0,00\%$]. Jumlah tersebut terdiri dari Saldo Awal Gedung dan Bangunan dengan nilai sebesar Rp34.128.420.115 (34,13 miliar rupiah), tidak terdapat Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan, serta tidak terdapat Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan

a. Bangunan Gedung (401XXXXXX)

Aset Bangunan Gedung pada Daftar Barang Kanwil DJBC Jakarta terdiri dari subkelompok: Bangunan Gedung Kantor Permanen, Bangunan Gedung Instalasi Lainnya, Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Lainnya. Tata penggunaan/pemilihan sebagian kode barang dari Bidang Bangunan Gedung di lingkungan DJBC diatur dalam SE-07/BC/2024 (Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Gedung Tempat Tinggal).

Saldo Bangunan Gedung per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp34.128.420.115 (34,13 miliar rupiah) [$\uparrow 0,00\%$]. Jumlah tersebut terdiri dari Saldo Awal Bangunan Gedung dengan nilai sebesar Rp34.128.420.115 (34,13 miliar rupiah), tidak terdapat Mutasi Tambah Bangunan Gedung, serta tidak terdapat Mutasi Kurang Bangunan Gedung

Saldo Akhir Bangunan Gedung tersebut dapat dirinci berdasarkan sub-kelompok dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	%
Bangunan Gedung Kantor	33.930.237.115		99,42%
Bangunan Gedung Instalasi	180.227.000		0,53%
Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga		17.956.000	0,05%

Akumulasi penyusutan berdasarkan sub-kelompok dari bidang barang Bangunan Gedung dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	% Penyusutan
Bangunan Gedung Kantor	33.930.237.115	-7.329.087.516	susut 21,60%
Bangunan Gedung Instalasi	180.227.000	-35.683.782	susut 19,80%
Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	17.956.000	-6.284.600	susut 35,00%

Tidak ada aset Bangunan Gedung yang Dihentikan Penggunaannya.

Tidak ada aset Bangunan Gedung yang Diusulkan Penghapusannya.

Saldo Bangunan Gedung di atas (selain dari yang dihentikan dan diusulkan penghapusan) berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai Perolehan
Baik	6 unit	34.128.420.115
Rusak Ringan	0 unit	0
Rusak Berat	0 unit	0
Tanpa Keterangan	0 unit	0

b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp7.371.055.898 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Nilai Perolehan	Susut Intrakomptabel	Susut Ekstrakomptabel	%
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	34.128.420.115	-7.364.771.298	-6.284.600	21,60%

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Nilai Perolehan	Susut Intrakomptabel	Susut Ekstrakomptabel	%
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	0	0	0,00%
Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	0	0	0,00%
Akumulasi Penyusutan Instalasi	0	0	0	0,00%

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya adalah sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Nilai Perolehan	Susut Intrakomptabel	Susut Ekstrakomptabel	%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0,00%

5. Konstruksi Dalam Pengerjaan (136XXX)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 pada Laporan Kuasa Pengguna Barang adalah sebesar Rp0 (nol rupiah) [$\uparrow 0,00\%$]. Jumlah tersebut terdiri dari Saldo Awal Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan nilai sebesar Rp805.449.400 (805,45 juta rupiah) [$\uparrow 100,00\%$], serta Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan nilai sebesar Rp805.449.400 (805,45 juta rupiah) [$\downarrow 100,00\%$]

a. Konstruksi Dalam Pengerjaan (701XXXXXX)

Aset berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Kuasa Pengguna Barang Kanwil DJBC Jakarta digunakan dalam rangka akun persinggahan akumulasi biaya pengadaan atau pengembangan aset yang sedang dalam pengerjaan dan belum diserahterimakan per tanggal akhir Periode. Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Daftar Barang Kanwil DJBC Jakarta terdiri dari subkelompok: Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 (nol rupiah) [$\uparrow 0,00\%$]. Jumlah tersebut terdiri dari Saldo Awal Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan nilai sebesar Rp805.449.400 (805,45 juta rupiah) [$\uparrow 100,00\%$], serta Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan nilai sebesar Rp805.449.400 (805,45 juta rupiah) [$\downarrow 100,00\%$]

Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Transfer Masuk KDP Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan [Sesuai]	805.449.400	

Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Transfer Masuk KDP Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan [Sesuai]	-805.449.400	

Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud adalah sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Nilai Perolehan	Susut Intrakomptabel	Susut Ekstrakomptabel	%
Akumulasi Amortisasi Software	0	0	0	0,00%

Mutasi Tambah Aset Tetap Dihentikan Penggunaannya dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Reklasifikasi Alat Kantor Lainnya dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	5.273.400	
Reklasifikasi Alat Pemotong Kertas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	2.200.000	
Reklasifikasi Alat Penghancur Kertas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	4.000.000	
Reklasifikasi CPU (Peralatan Personal Komputer) dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	40.352.400	
Reklasifikasi Filing Cabinet Besi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	5.940.000	
Reklasifikasi Kursi Besi/Metal dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	26.897.356	
Reklasifikasi Lap Top dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	246.904.644	
Reklasifikasi Lemari Besi/Metal dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	5.748.600	
Reklasifikasi Mesin Laminating dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	2.750.000	
Reklasifikasi Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	724.499.850	
Reklasifikasi P.C Unit dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	680.720.000	
Reklasifikasi Printer (Peralatan Personal Komputer) dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	44.100.000	
Reklasifikasi Scanner (Peralatan Personal	6.250.000	

Uraian Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Komputer) dari Aset Tetap ke Aset Lainnya		
Reklasifikasi Sepeda Motor dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	26.603.500	

Mutasi Kurang Aset Tetap Dihentikan Penggunaannya dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Pencatatan Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) Yang Mau Dihapuskan	-724.499.850	
Pencatatan Sepeda Motor Yang Mau Dihapuskan	-26.603.500	

Saldo Akhir Aset Tetap Dihentikan Penggunaannya tersebut dapat dirinci berdasarkan sub-kelompok dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	%
Alat Angkutan Darat Bermotor	0		0,00%
Alat Bengkel Tak Bermesin	20.805.400		1,35%
Alat Kantor	106.298.500		6,91%
Alat Rumah Tangga	26.897.356		1,75%
Peralatan Pemancar	366.870.763		23,84%
Komputer Unit	927.624.644		60,27%
Peralatan Komputer	90.702.400		5,89%

Akumulasi penyusutan berdasarkan sub-kelompok dari bidang barang Aset Tetap Dihentikan Penggunaannya dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	% Penyusutan
Alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	susut 0,00%
Alat Bengkel Tak Bermesin	20.805.400	-20.805.400	susut 100,00%
Alat Kantor	106.298.500	-106.298.500	susut 100,00%
Alat Rumah Tangga	26.897.356	-26.897.356	susut 100,00%
Peralatan Pemancar	366.870.763	-366.870.763	susut 100,00%
Komputer Unit	927.624.644	-927.624.644	susut 100,00%
Peralatan Komputer	90.702.400	-90.702.400	susut 100,00%

b. Akumulasi Penyusutan Aset Dihentikan Penggunaannya

Akumulasi Penyusutan Aset Dihentikan Penggunaannya adalah sebesar Rp1.539.199.063 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Subkelompok	Nilai Perolehan	Susut Intrakomptabel	Susut Ekstrakomptabel	%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	1.539.199.063	-1.539.199.063	0	100,00%
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	0	0	0	0,00%

C. Saldo Akhir per 31 Desember 2025

Uraian Neraca	Intrakomptabel	%	Ekstrakomptabel	%	Gabungan	%
ASET LANCAR						
Persediaan	84.280.569	0,08%	0	0,00%	84.280.569	0,08%
Jumlah Aset Lancar	84.280.569	0,08%	0	0,00%	84.280.569	0,08%
ASET TETAP						
Tanah	56.628.375.000	51,34%	0	0,00%	56.628.375.000	51,33%
Peralatan dan Mesin	17.934.462.897	16,26%	9.801.450	35,31%	17.944.264.347	16,26%
Gedung dan Bangunan	34.110.464.115	30,93%	17.956.000	64,69%	34.128.420.115	30,93%
Jalan dan Jembatan						
Irigasi						
Jaringan						
Aset Tetap Lainnya						
Aset Tetap Renovasi						
Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Jumlah Aset Tetap	108.673.302.012	98,53%	27.757.450	100,00%	108.701.059.462	98,53%
ASET LAINNYA						
Software						

Uraian Neraca	Intrakomptabel	%	Ekstrakomptabel	%	Gabungan	%
Aset Tak Berwujud Lainnya						
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan						
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1.539.199.063	1,40%	0	0,00%	1.539.199.063	1,40%
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah						
Jumlah Aset Lainnya	1.539.199.063	1,40%	0	0,00%	1.539.199.063	1,40%
Total	110.296.781.644	100,00%	27.757.450	100,00%	110.324.539.094	100,00%

Sedangkan rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Kanwil DJBC Jakarta per 31 Desember 2025 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

Uraian Neraca	Intrakomptabel	%	Ekstrakomptabel	%	Gabungan	%
PENYUSUTAN ASET TETAP						
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-15.935.893.728	64,15%	-9.676.575	60,63%	-15.945.570.303	64,15%
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-7.364.771.298	29,65%	-6.284.600	39,37%	-7.371.055.898	29,66%
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan						
Akumulasi Penyusutan Irigasi						
Akumulasi Penyusutan Jaringan						
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya						

Uraian Neraca	Intrakomptabel	%	Ekstrakomptabel	%	Gabungan	%
Jumlah Susut Aset Tetap	-23.300.665.026	93,80%	-15.961.175	100,00%	-23.316.626.201	93,81%
PENYUSUTAN ASET LAINNYA						
Akumulasi Amortisasi Software						
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	-1.539.199.063	6,20%	0	0,00%	-1.539.199.063	6,19%
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah						
Jumlah Susut Aset Lainnya	-1.539.199.063	6,20%	0	0,00%	-1.539.199.063	6,19%
Total	-24.839.864.089	100,00%	-15.961.175	100,00%	-24.855.825.264	100,00%

Sedangkan perbandingan antara akun pada Laporan Barang Intrakomptabel (Subsidiary Ledger) dengan akun Aset pada Neraca Laporan Keuangan (General Ledger) Kuasa Pengguna Kanwil DJBC Jakarta per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian Neraca	Laporan Keuangan	Laporan Barang	Selisih
Persediaan	84.280.569	84.280.569	0
Tanah	56.628.375.000	56.628.375.000	0
Peralatan dan Mesin	17.934.462.897	17.934.462.897	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-15.935.893.728	-15.935.893.728	0
Gedung dan Bangunan	34.110.464.115	34.110.464.115	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-7.364.771.298	-7.364.771.298	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
Akumulasi Penyusutan JIJ	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0	0

Uraian Neraca	Laporan Keuangan	Laporan Barang	Selisih
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
Aset Tidak Berwujud	0	0	0
Akumulasi Amortisasi ATB	0	0	0
Aset Tetap Dihentikan Penggunaannya	1.539.199.063	1.539.199.063	0
Aset Tak Berwujud Dihentikan Penggunaannya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dihentikan Penggunaannya	-1.539.199.063	-1.539.199.063	0
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Dihentikan Penggunaannya	0	0	0
Total Nilai BMN Intrakomptabel	85.456.917.555	85.456.917.555	0

Tidak terdapat selisih antara Neraca Laporan Keuangan (General Ledger) dengan Neraca Laporan Barang (Subsidiary Ledger) Kanwil DJBC Jakarta.

V. INFORMASI LAINNYA

A. Perkembangan Nilai BMN

Periode Laporan	Nilai BMN (Neraca + Ekstrakomptabel)	Perkembangan (Rp)	%
Tahunan 2025 AUDITED	85.468.713.830	85.468.713.830	0,00%
Tahunan 2024 Audited		0	0,00%
Tahunan 2023 Audited		0	0,00%
Tahunan 2022 Audited		0	0,00%
Tahunan 2021 Audited			

Perkembangan nilai BMN pada Periode Tahunan 2025 AUDITED dibandingkan Tahunan 2024 Audited mengalami kenaikan sebesar 0,00%. Tren ini disebabkan:

Konstruksi pembangunan Gedung Kantor maupun renovasi Rumah Negara mencapai ### proyek menyumbang cukup tinggi....
tetapi diimbangi dengan Penghapusan sebagai tindak lanjut sensus bmn 2023 -2024....

B. Informasi Pengelolaan BMN

1. Pengelolaan BMN (P4)

Berdasarkan data aplikasi pengelolaan aset, per 31 Desember 2025 terdapat 13 paket usulan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang Kanwil DJBC Jakarta dan sedang berproses untuk persetujuan/penetapan dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Jenis Pengelolaan	Tipe Pengelolaan	Proses Pengusulan / Analisis (paket)	Telah Persetujuan (paket)
Penggunaan BMN	Penetapan Status Penggunaan (PSP)	2	7
Pemindahtanganan BMN	Penjualan	1	2
Penghapusan BMN	Penghapusan Karena Sebab Lain Dan Penjualan Bongkaran	1	0

2. Penetapan Status Penggunaan BMN

Berdasarkan data aplikasi pengelolaan aset, per 31 Desember 2025, sebesar 100,00% dari aset yang tercatat pada Kuasa Pengguna Barang Kanwil DJBC Jakarta sudah ditetapkan penggunaannya.

Uraian Akun	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan	Belum Ditetapkan (Perolehan TA Berjalan)	Belum Ditetapkan (Perolehan TAYL)
Tanah	1	0	0
Peralatan dan Mesin	2.281	0	0
Gedung dan Bangunan	6	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0	0
JUMLAH	2.288	0	0

3. BMN Idle

Berdasarkan data aplikasi pengelolaan aset, BMN dengan status Tidak Digunakan (idle) yang tercatat pada Master Aset Kuasa Pengguna Barang Kanwil DJBC Jakarta adalah sebanyak NUP dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah). BMN tersebut telah dihentikan penggunaannya dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Uraian Barang Idle	NUP	Merk / Tipe	Nilai	Kondisi
-				

4. Status Penggunaan BMN

Berdasarkan data aplikasi pengelolaan aset, status penggunaan aset yang masih tercatat sebagai Aset Tetap aktif dalam Laporan Barang Kanwil DJBC Jakarta dapat direkapitulasi sebagai berikut:

Kode Golongan	Uraian Golongan	Status Penggunaan	Jumlah NUP	Total Nilai Perolehan
2	Tanah	Digunakan sendiri untuk operasional	1	56.628.375.000
3	Peralatan dan Mesin	Digunakan sendiri untuk dinas jabatan	1	610.000.000
3	Peralatan dan Mesin	Digunakan sendiri untuk kendaraan fungsional	8	2.416.107.682
3	Peralatan dan Mesin	Digunakan sendiri untuk operasional	2.072	14.918.156.665
4	Gedung dan Bangunan	Digunakan sendiri untuk operasional	6	34.128.420.115

C. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan Penghapusannya

1. Daftar Barang Kondisi Rusak Berat

Berdasarkan data aplikasi pengelolaan aset, BMN Rusak Berat yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Kanwil DJBC Jakarta adalah sebanyak 8 NUP dengan nilai sebesar Rp751.103.350 (751,1 juta rupiah). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam Neraca (General Ledger) maupun Laporan Barang (Subsidiary Ledger), tetapi disajikan dalam Daftar Barang Diusulkan Penghapusannya dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Uraian Barang Rusak Berat Diusulkan Hapus	Jumlah NUP	Nilai Perolehan
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	6	724.499.850
Sepeda Motor	2	26.603.500

2. Daftar Barang Hilang

Berdasarkan data aplikasi pengelolaan aset, tidak terdapat BMN Hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Kanwil DJBC Jakarta.

Uraian Barang Hilang Diusulkan Hapus	Jumlah NUP	Jumlah Nilai Perolehan
NIHIL	0	0

3. Barang Diusulkan Hapus karena Sebab Lainnya

Berdasarkan data aplikasi pengelolaan aset, BMN yang telah diusulkan Penghapusannya

karena sebab-sebab lainnya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Kanwil DJBC Jakarta adalah sebanyak 33 NUP dengan nilai sebesar Rp78.956.500 (78,96 juta rupiah). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam Neraca (General Ledger) maupun Laporan Barang (Subsidiary Ledger), tetapi disajikan dalam Daftar Barang Diusulkan Penghapusannya dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Uraian Barang Rusak Berat Diusulkan Hapus	Jumlah NUP	Nilai Perolehan
Fire Alarm	33	78.956.500

D. Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pengelolaan BMN

Berdasarkan Neraca Akrua Kanwil DJBC Jakarta, jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.380.000 (2,38 juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Nilai Pendapatan
425.122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	2.380.000
JUMLAH		2.380.000

E. Pengungkapan terkait Sensus BMN

Pasal 18 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara menyatakan bahwa "Pengguna Barang melakukan Inventarisasi (BMN) yang berada dalam penguasaannya melalui pelaksanaan sensus barang sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (tahun), untuk BMN selain persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan". Tujuan dari pelaksanaan sensus BMN agar semua BMN dapat tertata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan BMN. Pelaksanaan Sensus BMN berpedoman pada ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 42/MK.1/2017 tentang Pelaksanaan Sensus BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan.

1. Pelaksanaan Sensus BMN KIB

Pelaksanaan sensus BMN ber-KIB terakhir kali dilaksanakan pada bulan Maret 2023 s.d. Oktober 2023 dengan hasil yang direkapitulasi sebagai berikut:

JENIS BMN	Ditemukan Baik	Ditemukan Rusak Ringan	Ditemukan Rusak Berat	Tidak Ditemukan	Berlebih	x
Tanah	1	0	4	0	0	x
AADB	21	0	0	0	0	x
Alat Besar	18	0	0	0	0	x

2. Pelaksanaan Sensus BMN NonKIB

Pelaksanaan sensus BMN ber-KIB terakhir kali dilaksanakan pada bulan Februari 2024 s.d. September 2024 dengan hasil yang direkapitulasi sebagai berikut:

JENIS BMN	Ditemukan Baik	Ditemukan Rusak Ringan	Ditemukan Rusak Berat	Tidak Ditemukan	Berlebih	x
Mesin dan Peralatan Non-TIK	1.792	50	51	0	0	x
Mesin dan Peralatan Khusus TIK	88	52	113	0	0	x
Jalan dan Jembatan	0	0	0	0	0	x
Instalasi dan Jaringan	0	0	0	0	0	x
Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0	x
Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	0	x
TOTAL	1.880	102	164	0	0	x

Tindak Lanjut Hasil Sensus BMN NonKIB Tahun Kategori Tidak Ditemukan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 s.d. Juni 2025, dan per 31 Desember 2025 dapat direkapitulasi sebagai berikut:

JENIS BMN	Double Catat	TL DC	Penelusuran Lebih Lanjut	TL PLL	Proses Pemindahtanganan / Penghapusan	TL P2
Mesin dan Peralatan Non-TIK	0	0	0	0	0	0
Mesin dan Peralatan Khusus TIK	0	0	0	0	0	0
Jalan dan Jembatan	0	0	0	0	0	0
Instalasi dan Jaringan	0	0	0	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0	0
Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Tindak Lanjut Hasil Sensus BMN NonKIB Tahun Kategori Tidak Ditemukan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 s.d. Juni 2025, dan per 31 Desember 2025 dapat direkapitulasi sebagai berikut:

JENIS BMN	Berlebih	TL Berlebih	Salah Kodefikasi	TL Salah Kode	x	x
Mesin dan Peralatan Non-TIK	x	x	x	x	x	x
Mesin dan Peralatan Khusus TIK	x	x	x	x	x	x
Jalan dan Jembatan	x	x	x	x	x	x
Instalasi dan Jaringan	x	x	x	x	x	x
Aset Tetap Lainnya	x	x	x	x	x	x
Aset Tak Berwujud	x	x	x	x	x	x
TOTAL	0	0	0	0	x	x

F. Permasalahan Penatausahaan BMN

Permasalahan yang perlu disampaikan sehubungan dengan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN khususnya terkait penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Kanwil DJBC Jakarta Periode Tahunan 2025 AUDITED, antara lain sebagai berikut:

1. Pergantian operator BMN kadang kala tidak didahului dengan transfer pengetahuan, sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan dalam proses pembukuan di modul aset maupun persediaan pada aplikasi SAKTI.
2. Aplikasi SAKTI dan MonSAKTI selaku sistem informasi pendukung pelaksanaan penatausahaan BMN memerlukan beberapa pengembangan atau perbaikan antara lain menu input transaksi penyerahan BMN idle ke Pengelola Barang, serta Laporan Kondisi Barang, Laporan Barang Hilang, Laporan Barang Rusak Berat, Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pengelolaan BMN belum sepenuhnya sesuai dengan format Penyajian Laporan yang diamanatkan dalam aturan yang berlaku.
3. Kementerian Keuangan merupakan unit piloting Aplikasi SIMAN v2. Namun demikian, data pengelolaan BMN pada Aplikasi SIMAN v2 belum dapat sepenuhnya menunjang proses penyusunan Laporan Barang Pengguna baik dari sisi sistem aplikasi maupun kelengkapan data. Aplikasi SIMAN v2 masih dalam tahap pengembangan, sehingga beberapa fitur untuk melengkapi data belum tersedia terutama dalam penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara tidak dapat menggunakan modul yang disediakan dari Aplikasi SIMAN v2.

Dalam rangka penyelesaian permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN khususnya terkait penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Kanwil DJBC Jakarta Periode Tahunan 2025 AUDITED, dilaksanakan langkah-langkah strategis antara lain sebagai berikut:

1. Berkoordinasi secara dengan koordinator wilayah dan koordinator tingkat E1 di Kantor Pusat DJBC dalam rangka memastikan kebenaran dan akurasi input data baik di aplikasi SAKTI (pelaporan) maupun aplikasi SIMAN (pengelolaan).
2. Berkoordinasi dengan koordinator wilayah dan koordinator tingkat E1 serta

memberikan feedback terkait permasalahan dalam rangka penggunaan aplikasi yang memerlukan trouble-shooting.

VI. TINDAK LANJUT TEMUAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024, tidak terdapat temuan terkait Penatausahaan dan Pengelolaan Persediaan dan Aset Tetap pada Kuasa Pengguna Barang Kanwil DJBC Jakarta.

Penanggung Jawab Unit Akuntansi
Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Hendri Darnadi



**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2025**

UAPB : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
UAKPB : 668906 **KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA**

Tgl.Data : 07/05/26 6:36 AM
Tgl.Cetak : 07/05/26 10:33 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	58,860,479
117112	Amunisi	8,450,255
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	16,969,835
131111	Tanah	56,628,375,000
132111	Peralatan dan Mesin	17,934,462,897
133111	Gedung dan Bangunan	34,110,464,115
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(15,935,893,728)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(7,364,771,298)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,539,199,063
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(1,539,199,063)
J U M L A H		85,456,917,555

JAKARTA, 7 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HENDRI DARNADI
NIP 197007121991031001

**LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
UAKPB : 668906 **KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA**

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM
Tanggal : 07/05/26 10:42 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_posisi_neraca_satker

Kode	Uraian	NILAI
117111	Barang Konsumsi	58,860,479
117112	Amunisi	8,450,255
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	16,969,835
117114	Suku Cadang	0
117131	Bahan Baku	0
117199	Persediaan Lainnya	0
JUMLAH		84,280,569

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 668906 KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 10:37 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		1,973	56,628,375,000	0	0	0	0	1,973	56,628,375,000
20101	TANAH PERSIL	-	1,973	56,628,375,000	0	0	0	0	1,973	56,628,375,000
132111	Peralatan dan Mesin		2,150	18,701,646,447	31	1,055,056,200	164	1,822,239,750	2,017	17,934,462,897
30101	ALAT BESAR DARAT	-	2	156,400,000	0	0	0	0	2	156,400,000
30103	ALAT BANTU	-	16	3,238,286,036	0	0	0	0	16	3,238,286,036
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	19	3,029,091,912	2	805,449,400	8	751,103,350	13	3,083,437,962
30501	ALAT KANTOR	-	502	2,757,917,513	0	0	11	25,912,000	491	2,732,005,513
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1,197	3,827,938,068	0	0	36	26,897,356	1,161	3,801,040,712
30601	ALAT STUDIO	-	51	511,872,096	0	0	0	0	51	511,872,096
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	40	511,506,852	0	0	0	0	40	511,506,852
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	1	1,925,000	0	0	0	0	1	1,925,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	2	8,590,000	0	0	0	0	2	8,590,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	2	17,400,000	0	0	0	0	2	17,400,000
30901	SENJATA API	-	27	182,270,000	0	0	0	0	27	182,270,000
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	-	2	42,000,000	0	0	0	0	2	42,000,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	2	1,188,807,400	0	0	0	0	2	1,188,807,400
31001	KOMPUTER UNIT	-	213	2,346,823,644	29	249,606,800	93	927,624,644	149	1,668,805,800
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	69	653,845,976	0	0	16	90,702,400	53	563,143,576
31502	ALAT PELINDUNG	-	2	211,140,450	0	0	0	0	2	211,140,450
31503	ALAT SAR	-	1	2,703,000	0	0	0	0	1	2,703,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	1	8,233,500	0	0	0	0	1	8,233,500
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	1	4,895,000	0	0	0	0	1	4,895,000
133111	Gedung dan Bangunan		4	34,110,464,115	0	0	0	0	4	34,110,464,115
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	4	34,110,464,115	0	0	0	0	4	34,110,464,115
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		36	468,062,663	164	1,822,239,750	8	751,103,350	192	1,539,199,063
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	0	0	8	751,103,350	8	751,103,350	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	1	20,805,400	0	0	0	0	1	20,805,400
30501	ALAT KANTOR	-	34	80,386,500	11	25,912,000	0	0	45	106,298,500
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	0	0	36	26,897,356	0	0	36	26,897,356
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	1	366,870,763	0	0	0	0	1	366,870,763
31001	KOMPUTER UNIT	-	0	0	93	927,624,644	0	0	93	927,624,644
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	0	0	16	90,702,400	0	0	16	90,702,400
TOTAL				109,908,548,225		2,877,295,950		2,573,343,100		110,212,501,075

JAKARTA, 7 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HENDRI DARNADI
NIP 197007121991031001

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 668906 KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 07/05/26 10:37 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU	
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8	
132111	Peralatan dan Mesin		64	9,801,450	0	0	0	64	9,801,450
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	54	8,553,600	0	0	0	54	8,553,600
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	1	416,250	0	0	0	1	416,250
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	9	831,600	0	0	0	9	831,600
133111	Gedung dan Bangunan		2	17,956,000	0	0	0	2	17,956,000
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	2	17,956,000	0	0	0	2	17,956,000
TOTAL				27,757,450		0		0	27,757,450

JAKARTA, 7 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HENDRI DARNADI
NIP 197007121991031001

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 10:37 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_satker_poc

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 668906 KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN				KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		1,973	56,628,375,000	0	0	0	0	1,973	56,628,375,000
20101	TANAH PERSIL	-	1,973	56,628,375,000	0	0	0	0	1,973	56,628,375,000
132111	Peralatan dan Mesin		2,214	18,711,447,897	31	1,055,056,200	164	1,822,239,750	2,081	17,944,264,347
30101	ALAT BESAR DARAT	-	2	156,400,000	0	0	0	0	2	156,400,000
30103	ALAT BANTU	-	16	3,238,286,036	0	0	0	0	16	3,238,286,036
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	19	3,029,091,912	2	805,449,400	8	751,103,350	13	3,083,437,962
30501	ALAT KANTOR	-	502	2,757,917,513	0	0	11	25,912,000	491	2,732,005,513
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1,251	3,836,491,668	0	0	36	26,897,356	1,215	3,809,594,312
30601	ALAT STUDIO	-	51	511,872,096	0	0	0	0	51	511,872,096
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	41	511,923,102	0	0	0	0	41	511,923,102
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	1	1,925,000	0	0	0	0	1	1,925,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	11	9,421,600	0	0	0	0	11	9,421,600
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	2	17,400,000	0	0	0	0	2	17,400,000
30901	SENJATA API	-	27	182,270,000	0	0	0	0	27	182,270,000
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	-	2	42,000,000	0	0	0	0	2	42,000,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	2	1,188,807,400	0	0	0	0	2	1,188,807,400
31001	KOMPUTER UNIT	-	213	2,346,823,644	29	249,606,800	93	927,624,644	149	1,668,805,800
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	69	653,845,976	0	0	16	90,702,400	53	563,143,576
31502	ALAT PELINDUNG	-	2	211,140,450	0	0	0	0	2	211,140,450
31503	ALAT SAR	-	1	2,703,000	0	0	0	0	1	2,703,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	1	8,233,500	0	0	0	0	1	8,233,500
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	1	4,895,000	0	0	0	0	1	4,895,000
133111	Gedung dan Bangunan		6	34,128,420,115	0	0	0	0	6	34,128,420,115
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	6	34,128,420,115	0	0	0	0	6	34,128,420,115
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		36	468,062,663	164	1,822,239,750	8	751,103,350	192	1,539,199,063
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	0	0	8	751,103,350	8	751,103,350	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	1	20,805,400	0	0	0	0	1	20,805,400
30501	ALAT KANTOR	-	34	80,386,500	11	25,912,000	0	0	45	106,298,500
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	0	0	36	26,897,356	0	0	36	26,897,356
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	1	366,870,763	0	0	0	0	1	366,870,763
31001	KOMPUTER UNIT	-	0	0	93	927,624,644	0	0	93	927,624,644
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	0	0	16	90,702,400	0	0	16	90,702,400
TOTAL				109,936,305,675		2,877,295,950		2,573,343,100		110,240,258,525

JAKARTA, 7 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HENDRI DARNADI
NIP 197007121991031001

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 668906 KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM
Tanggal : 07/05/26 10:38 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

JAKARTA, 7 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HENDRI DARNADI
NIP 197007121991031001

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 668906 KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 07/05/26 10:39 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
131111	Tanah		1,973	56,628,375,000	0	0	0	56,628,375,000
20101	TANAH PERSIL	-	1,973	56,628,375,000	0	0	0	56,628,375,000
132111	Peralatan dan Mesin		2,017	17,934,462,897	(17,152,503,237)	1,216,609,509	(15,935,893,728)	1,998,569,169
30101	ALAT BESAR DARAT	-	2	156,400,000	(156,400,000)	0	(156,400,000)	0
30103	ALAT BANTU	-	16	3,238,286,036	(3,237,697,929)	(588,107)	(3,238,286,036)	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	13	3,083,437,962	(2,549,806,199)	606,428,393	(1,943,377,806)	1,140,060,156
30501	ALAT KANTOR	-	491	2,732,005,513	(2,698,217,513)	6,012,000	(2,692,205,513)	39,800,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1,161	3,801,040,712	(3,827,938,068)	26,897,356	(3,801,040,712)	0
30601	ALAT STUDIO	-	51	511,872,096	(340,023,096)	(43,923,000)	(383,946,096)	127,926,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	40	511,506,852	(289,363,852)	(49,854,000)	(339,217,852)	172,289,000
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	1	1,925,000	(1,925,000)	0	(1,925,000)	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	2	8,590,000	(8,590,000)	0	(8,590,000)	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	2	17,400,000	(17,400,000)	0	(17,400,000)	0
30901	SENJATA API	-	27	182,270,000	(182,270,000)	0	(182,270,000)	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	-	2	42,000,000	(42,000,000)	0	(42,000,000)	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	2	1,188,807,400	(1,181,362,400)	(3,722,500)	(1,185,084,900)	3,722,500
31001	KOMPUTER UNIT	-	149	1,668,805,800	(1,950,772,394)	641,789,244	(1,308,983,150)	359,822,650
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	53	563,143,576	(612,220,976)	76,827,400	(535,393,576)	27,750,000
31502	ALAT PELINDUNG	-	2	211,140,450	(42,228,090)	(42,228,090)	(84,456,180)	126,684,270
31503	ALAT SAR	-	1	2,703,000	(2,703,000)	0	(2,703,000)	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	1	8,233,500	(6,689,720)	(1,029,187)	(7,718,907)	514,593
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	1	4,895,000	(4,895,000)	0	(4,895,000)	0
133111	Gedung dan Bangunan		4	34,110,464,115	(6,561,483,280)	(803,288,018)	(7,364,771,298)	26,745,692,817
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	4	34,110,464,115	(6,561,483,280)	(803,288,018)	(7,364,771,298)	26,745,692,817
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		192	1,539,199,063	(468,062,663)	(1,071,136,400)	(1,539,199,063)	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	1	20,805,400	(20,805,400)	0	(20,805,400)	0
30501	ALAT KANTOR	-	45	106,298,500	(80,386,500)	(25,912,000)	(106,298,500)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	36	26,897,356	0	(26,897,356)	(26,897,356)	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	1	366,870,763	(366,870,763)	0	(366,870,763)	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	93	927,624,644	0	(927,624,644)	(927,624,644)	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	16	90,702,400	0	(90,702,400)	(90,702,400)	0
JUMLAH			4,186	110,212,501,075	(24,182,049,180)	(657,814,909)	(24,839,864,089)	85,372,636,986

JAKARTA, 7 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HENDRI DARNADI
NIP 197007121991031001

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 668906 KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 07/05/26 10:39 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
132111	Peralatan dan Mesin		64	9,801,450	(9,593,325)	(83,250)	(9,676,575)	124,875
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	54	8,553,600	(8,553,600)	0	(8,553,600)	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	1	416,250	(208,125)	(83,250)	(291,375)	124,875
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	9	831,600	(831,600)	0	(831,600)	0
133111	Gedung dan Bangunan		2	17,956,000	(5,925,480)	(359,120)	(6,284,600)	11,671,400
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	2	17,956,000	(5,925,480)	(359,120)	(6,284,600)	11,671,400
JUMLAH			66	27,757,450	(15,518,805)	(442,370)	(15,961,175)	11,796,275

JAKARTA, 7 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HENDRI DARNADI
NIP 197007121991031001

**LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 668906 KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM
Tanggal : 07/05/26 10:39 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_kel_satker_

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	MUTASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8

JAKARTA, 7 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HENDRI DARNADI
NIP 197007121991031001

**DAFTAR BMN HIBAH DK/TP YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

NAMA UAKPB : KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA
KODE UAKPB : 668906

TANGGAL : 07-05-2026
Kode LAP : daftar_bmn_dhdktp_poc
HALAMAN : 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

JAKARTA, 07 MEI 2026
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HENDRI DARNADI
NIP 197007121991031001

**DAFTAR BMN HILANG YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

NAMA UAKPB : KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA
KODE UAKPB : 668906

TANGGAL : 07-05-2026
Kode LAP : daftar_bmn_dbh_poc
HALAMAN : 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
Tidak ada data											
JUMLAH											

JAKARTA, 07 MEI 2026
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HENDRI DARNADI
NIP 197007121991031001

**DAFTAR BARANG BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

NAMA UAKPB : KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA
KODE UAKPB : 668906

TANGGAL : 07-05-2026
Kode LAP : daftar_bmn_bpybds_p
HALAMAN : 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

JAKARTA, 07 MEI 2026
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HENDRI DARNADI
NIP 197007121991031001

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
BARANG BERSEJARAH
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 668906 KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM
Tanggal : 07/05/26 12:10 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sejarah_satker_poc

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
				BERTAMBAH	BERKURANG	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS
1	2	3	4	5	6	7

JAKARTA, 7 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HENDRI DARNADI
NIP 197007121991031001

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

UAPB : 015
UAKPB : 668906

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM
Tanggal : 07/05/26 12:10 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_kdp_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D 1 JANUARI 2025	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	805,449,400	805,449,400	0	
7010101002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	0	805,449,400	805,449,400	0	
TOTAL		0	805,449,400	805,449,400	0	

JAKARTA, 7 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HENDRI DARNADI
NIP 197007121991031001